



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

# PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Muhamad Faozi Kurniawan

Kebijakan & Manajemen Kesehatan (HPM)

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan

Universitas Gadjah Mada

2024



# Isi



1. Pendahuluan
2. Sumber Dana
3. Mekanisme pembiayaan
4. Kasus di Indonesia
5. Penutup



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA



1

# Pendahuluan

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED



# Indonesia rentan terhadap berbagai ancaman bencana



UNIVERSITAS GADJAH MADA

## Bencana Alam

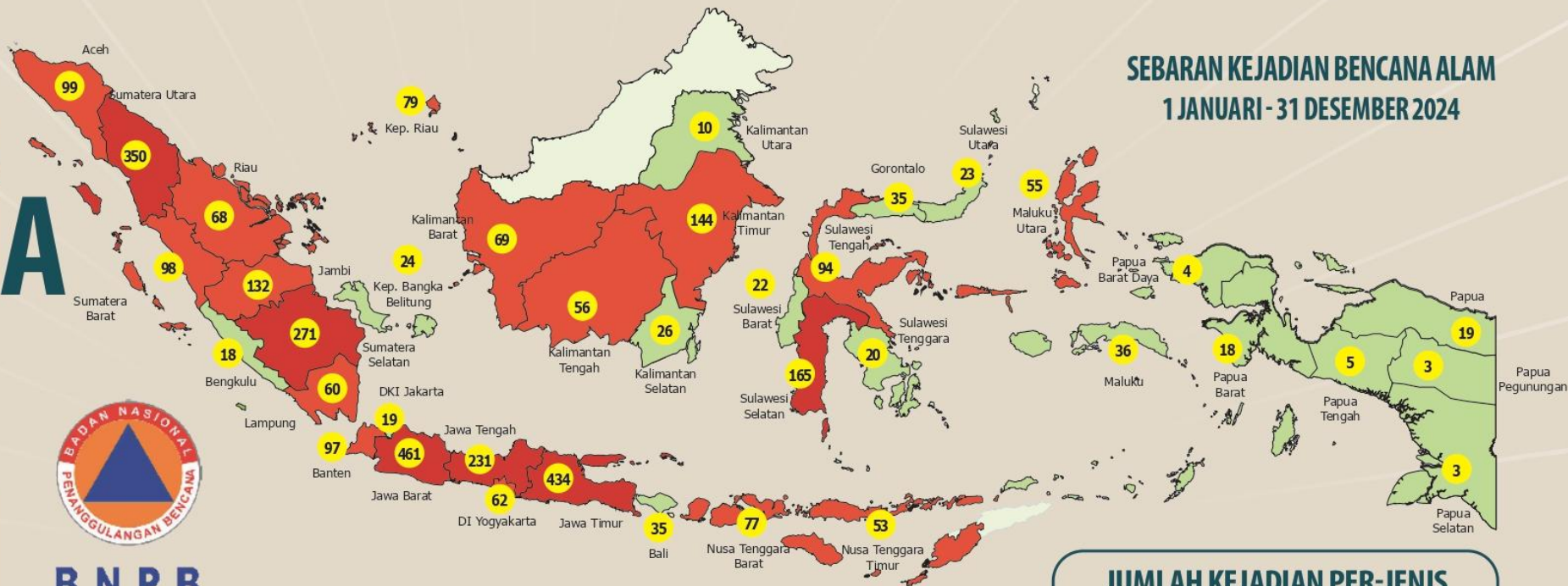


## Bencana Non Alam





# BENCANA INDONESIA 2024



## DAMPAK KERUSAKAN AKIBAT BENCANA ALAM TAHUN 2024

**RUMAH RUSAK - TOTAL : 80.304**

**RUMAH RUSAK BERAT 13.104**

**RUMAH RUSAK SEDANG 15.295**

**RUMAH RUSAK RINGAN 51.905**

**FASILITAS RUSAK - TOTAL : 1.109**

**SATUAN PENDIDIKAN 612**

**RUMAH IBADAT 415**

**FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 82**

**KANTOR & JEMBATAN RUSAK - TOTAL : 534**

**KANTOR RUSAK 89**

**JEMBATAN RUSAK 445**

## DAMPAK BENCANA ALAM 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2024

**MENINGGAL DUNIA 540**

**HILANG 63**

**LUKA - LUKA/SAKIT 11.531**

**MENDERITA & MENGUNGSI 8.136.271**

## TOTAL BENCANA TAHUN 2024

Update 31 Desember 2024

# 3.472

## JUMLAH KEJADIAN PER-JENIS BENCANA TAHUN 2024

### BENCANA ALAM

**GEMPA BUMI 15**

**ERUPSI GUNUNG API 8**

**BANJIR 1.420**

**KARHUTLA 973**

**CUACA EKSTREM 733**

**TANAH LONGSOR 207**

**KEKERINGAN 89**

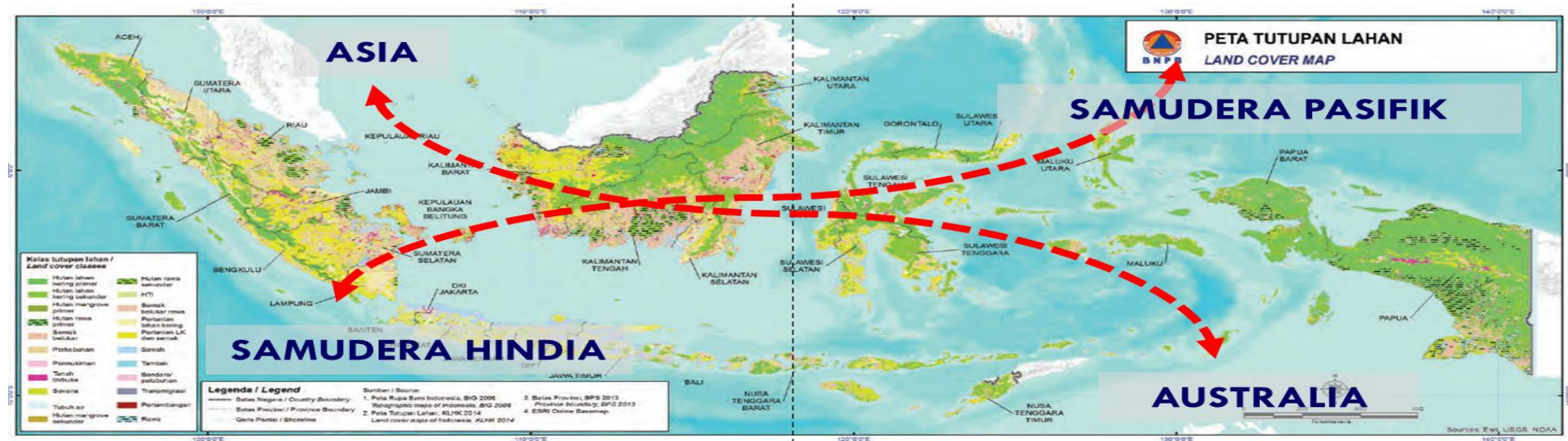
**GELOMBANG PASANG & ABRASI 27**



# Indonesia rentan terhadap Bencana Non alam/ Bencana kesehatan



UNIVERSITAS GADJAH MADA



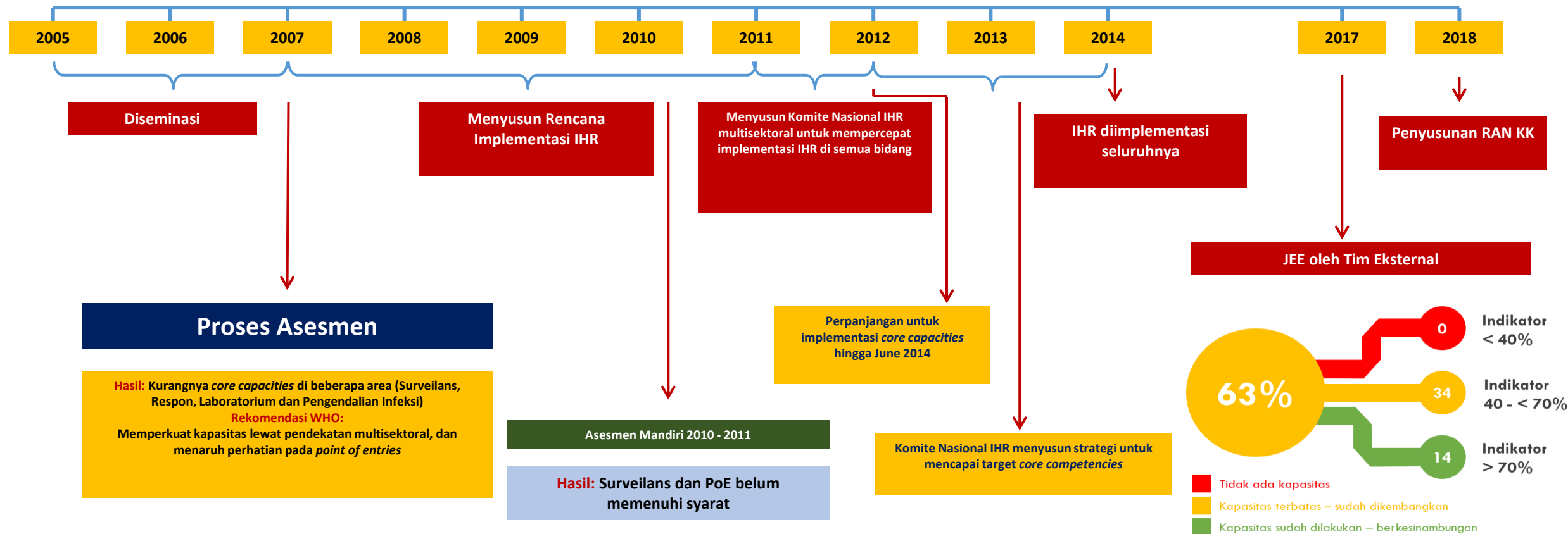
- Wilayah yang berisiko tinggi terhadap **penyakit menular** termasuk zoonosis, seperti SARS (2003), Avian Flu (2003), Zika (2016), dsb
- **Biodiversitas dan interaksi** yang tinggi antara manusia, hewan, dan lingkungan



## KETAHANAN KESEHATAN



# Ketahanan Kesehatan Indonesia



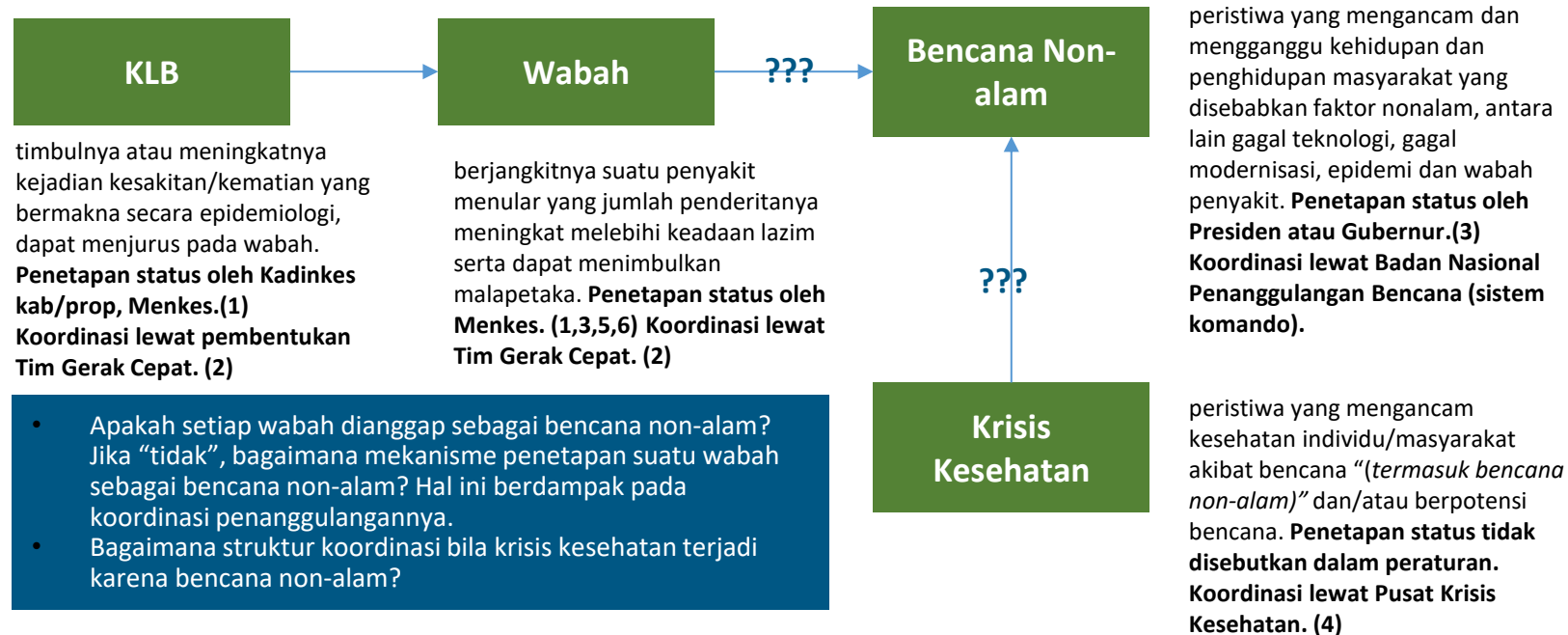
Sumber: Kemenkes RI, 2018. Indonesia experience in developing national action plan for health security. 5<sup>th</sup> GHSA Ministerial Meeting.

# Bagaimana koordinasi ketahanan kesehatan dari perspektif bencana?



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Peraturan dan perundangan terkait bencana, wabah dan krisis kesehatan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga berbeda dengan penggunaan istilah dan skema koordinasi yang berbeda pula.



**Siapa yang menjadi Leader?**

## Sumber :

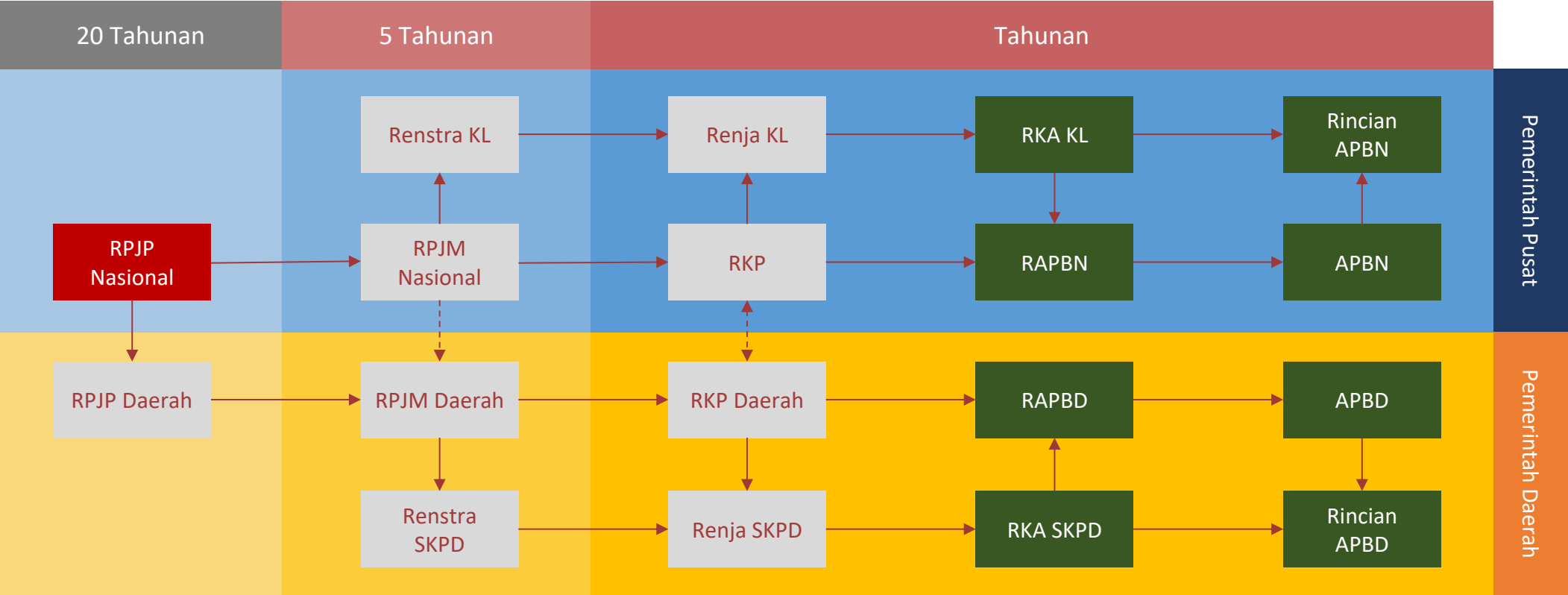
1. Permenkes Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Penyakit Menular Berpotensi Wabah
2. Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan
5. Undang-undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah
6. Peraturan pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan wabah penyakit menular



status dapat berubah



# Proses perencanaan program di tingkat pusat dan daerah melalui berbagai tahapan yang kompleks, merujuk pada RPJMN/D dan RPJPN/D --> mendukung Ketahanan Kesehatan tingkat Pusat dan Daerah



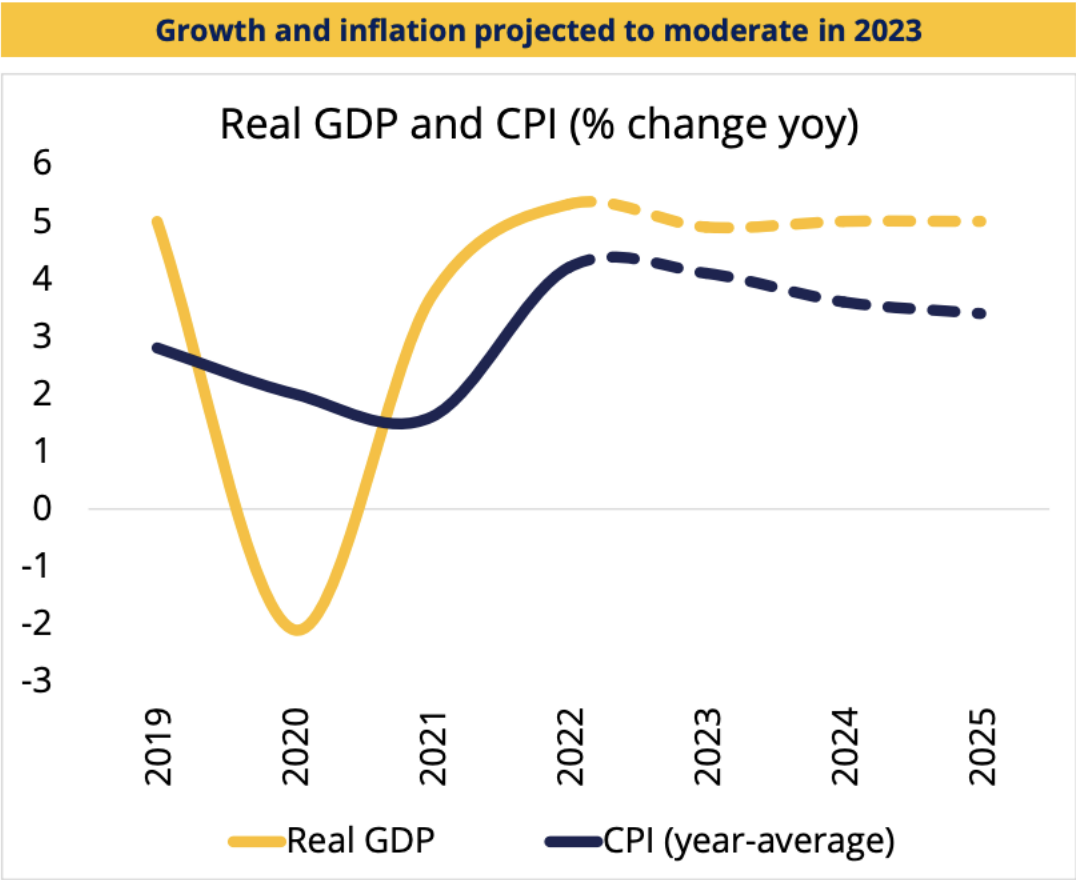
Sumber :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



# Konteks Fiskal Makro Indonesia

# Sumber-sumber penyeimbangan kembali pertumbuhan ekonomi seiring dengan normalisasi ekonomi dari pengaruh kondisi global



Amid stable macroeconomic conditions

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Actual				Projection		
Real GDP	5.0	-2.1	3.7	5.3	4.9	5.0	5.0
CPI (end of period)	2.6	1.7	1.9	5.5	3.6	3.4	3.3
Fiscal Balance	-2.2	-612	-4.6	-2.4	-2.5	-2.5	-2.5
Central Government Debt	30.2	39.3	40.7	39.5	39.2	38.8	38.6
Current account balance	-2.7	-0.4	0.3	1.0	0.0	-0.4	-1.0
Net Foreign Direct Investment	1.8	1.3	1.5	1.1	1.3	1.3	1.4

Source: BPS, WB staff calculations.

Source: BPS, Bank Indonesia, WB staff calculations.

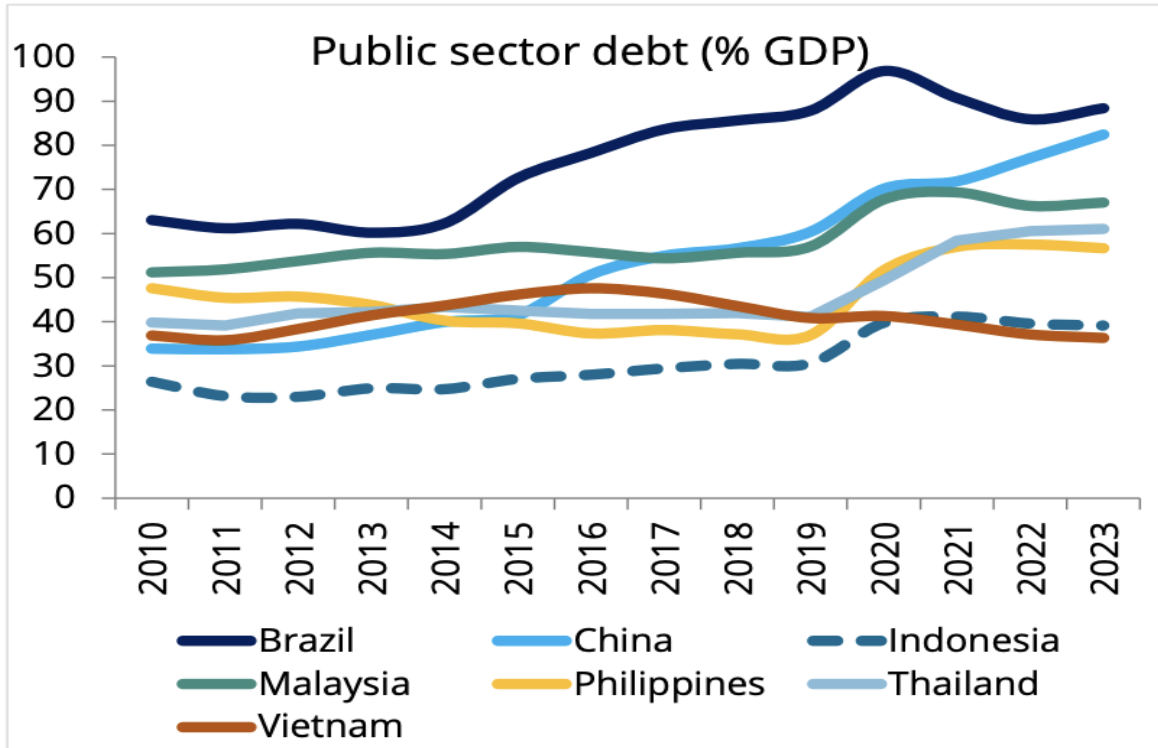


# Indonesia mengalami kemajuan yang bermakna...



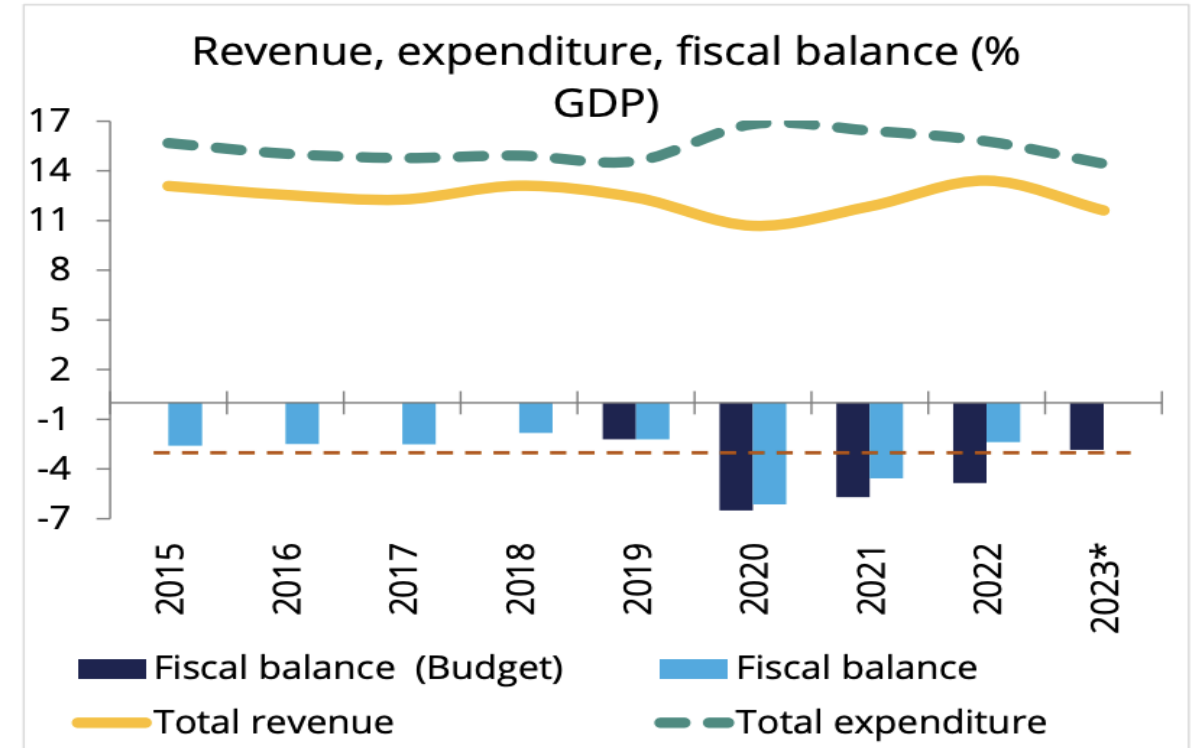
UNIVERSITAS GADJAH MADA

## Government debt increased by less than peer countries during COVID



Source: IMF Fiscal Monitor April 2023.

## And has started to decline with prudent fiscal policies and growth

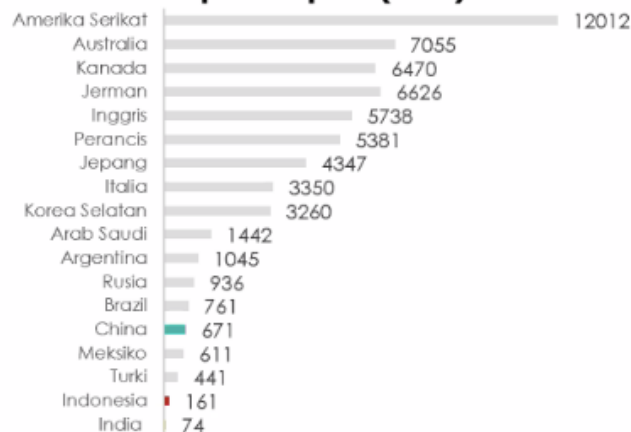


Source: Ministry of Finance, WB staff calculations.

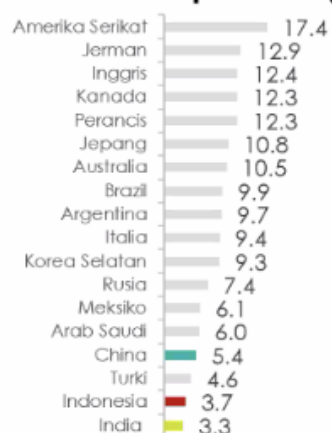
# Belanja Kesehatan Indonesia diantara Negara Anggota G20

Skema publik masih mendominasi proporsi belanja kesehatan di berbagai negara

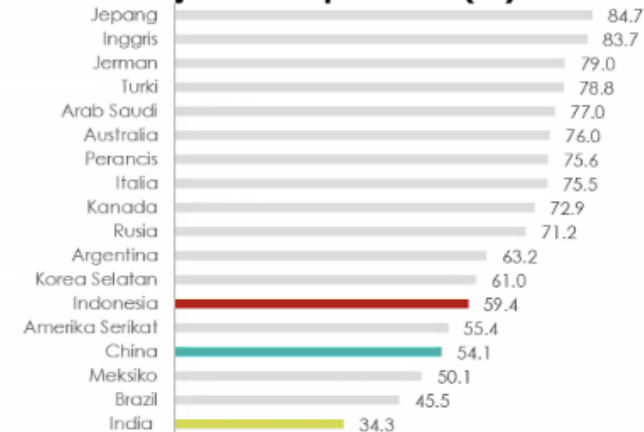
## CHE per Kapita (USD)



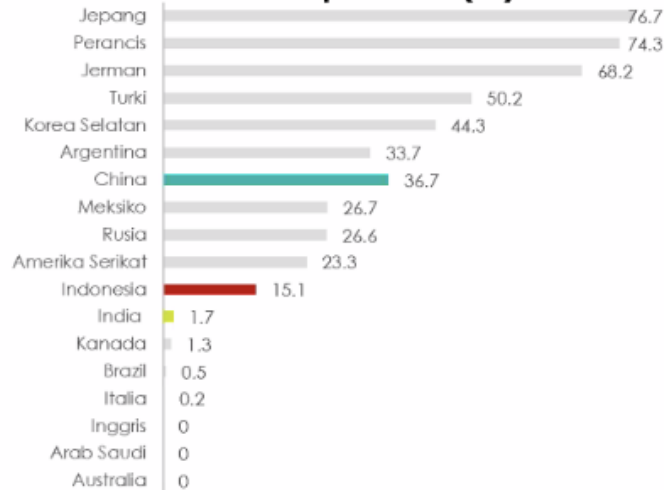
## CHE per PDB (%)



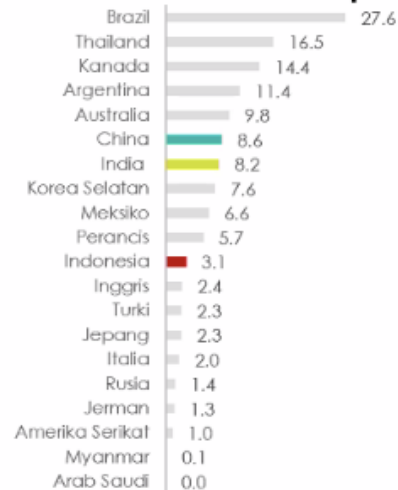
## Belanja Publik per CHE (%)



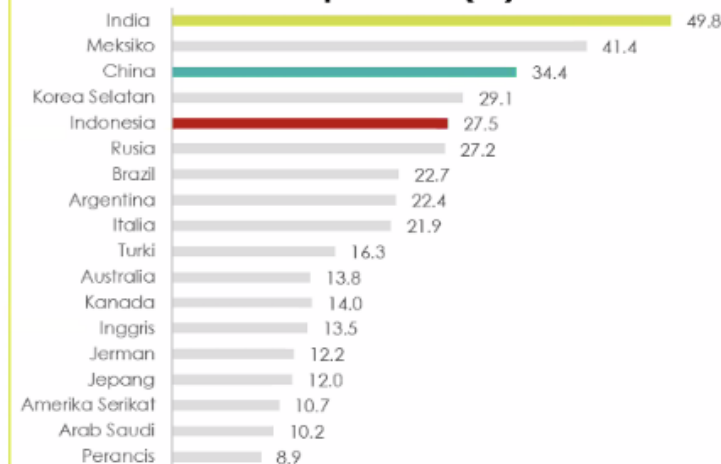
## Askes Sosial per CHE (%)



## Asuransi Swasta per CHE (%)



## OOP per CHE (%)

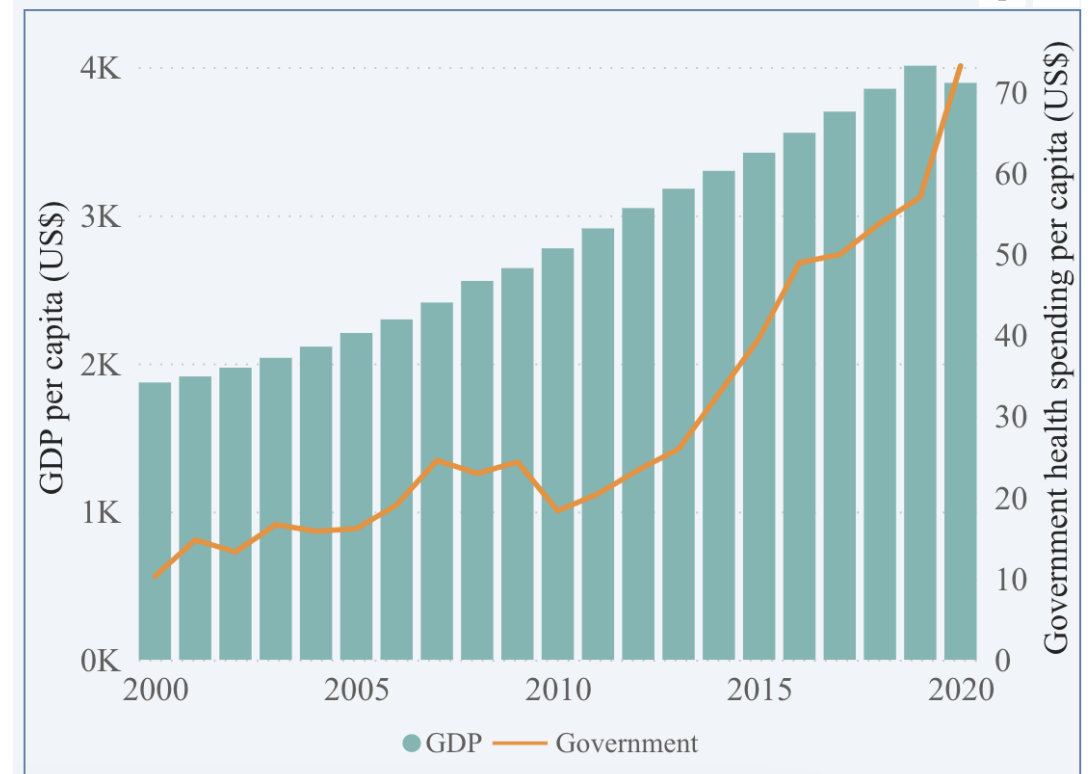




# GDP Indonesia

	2005	2010	2015	2020
Health spending US\$ per capita (CHE)	34	86	97	133
Government health spending % Health spending (GGHE-D%CHE)	28.9%	23.7%	39.6%	55.0%
Out-of-pocket spending % Health spending (OOPS%CHE)	55.3%	60.6%	43.0%	31.8%
Priority to health (GGHE-D%GGE)	4.2%	3.9%	6.6%	10.1%
GDP US\$ per capita	1,359	3,094	3,323	3,894

**GDP and government health spending per capita (constant US\$ 2020)**





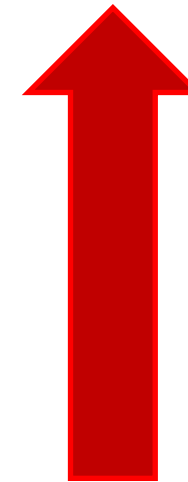
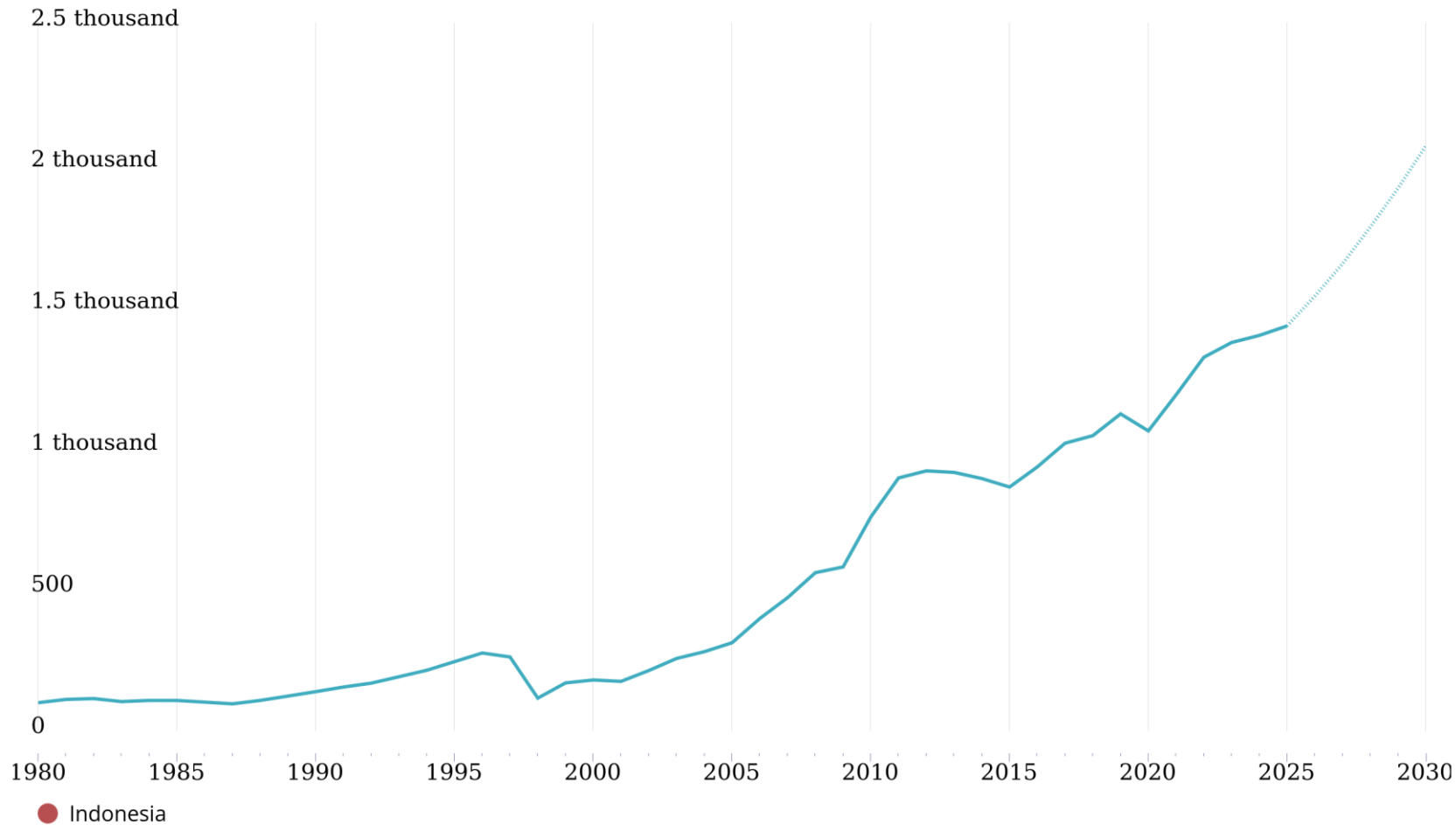
# GDP Indonesia



UNIVERSITAS GADJAH MADA

IMF DataMapper

GDP, current prices (Billions of U.S. dollars)



Pertumbuhan

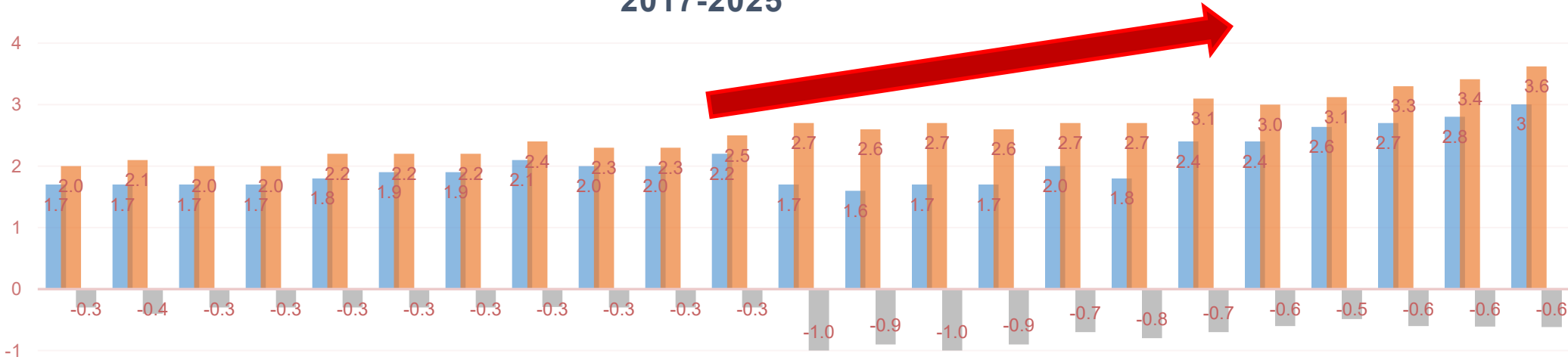
©IMF, 2025, Source: World Economic Outlook (April 2025)

# Kondisi APBN 2017 - 2025



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
2017-2025

RIBU TRILIUN (KUADRILIUN) RUPIAH



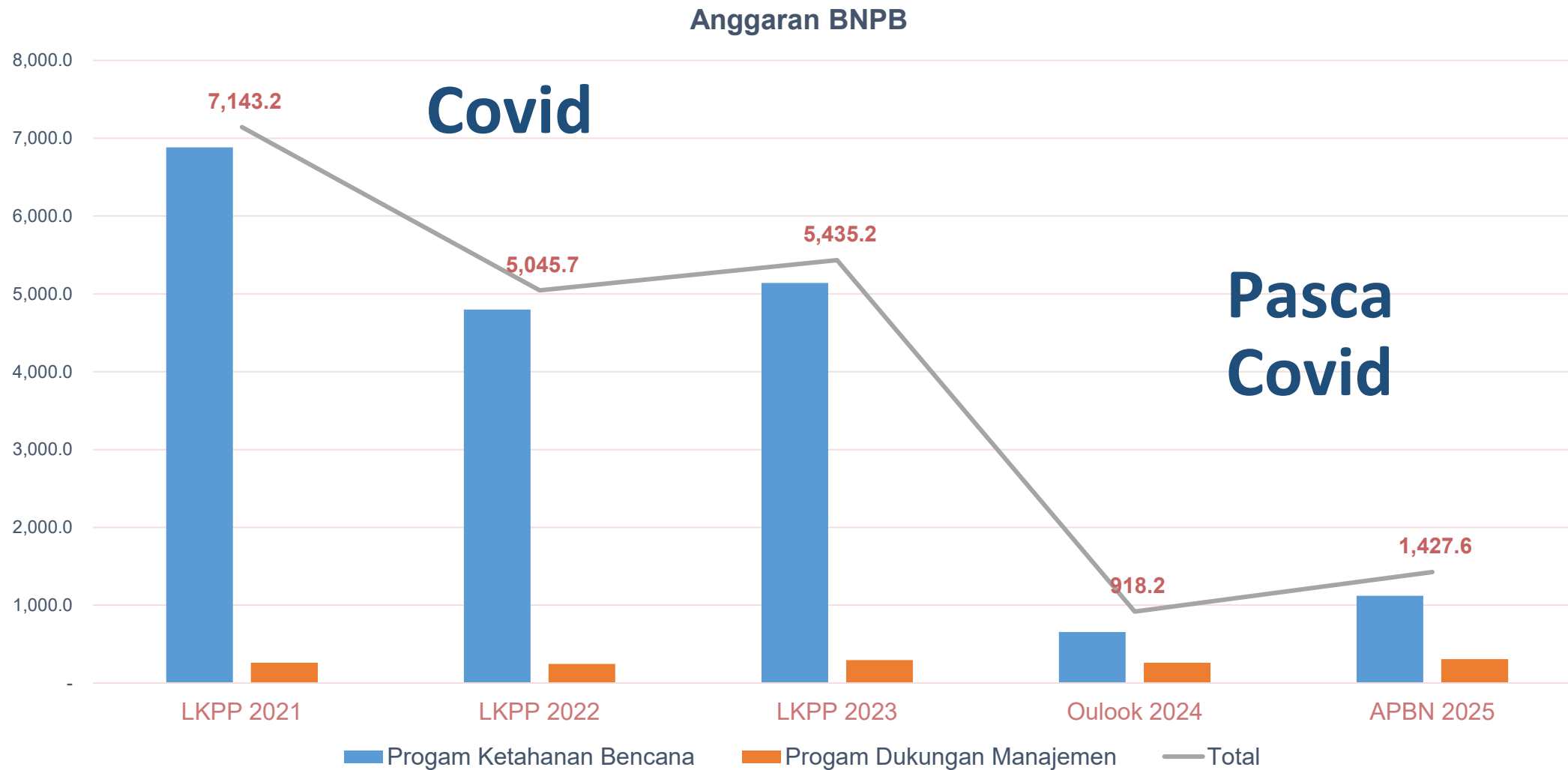
	APBN	APBN-P	Outlook	LKPP	APBN	Outlook	LKPP	APBN	Outlook	LKPP	APBN	Outlook	LKPP	APBN	Outlook	LKPP	APBN	Outlook	APBN	Outlook	APBN	Outlook	APBN
	2017				2018			2019			2020			2021			2022		2023		2024		2025
■ Pendapatan Negara	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	2.1	2.0	2.0	2.2	1.7	1.6	1.7	1.7	2.0	1.8	2.4	2.4	2.6	2.7	2.8	3
■ Belanja Negara	2.0	2.1	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	2.4	2.3	2.3	2.5	2.7	2.6	2.7	2.6	2.7	2.7	3.1	3.0	3.1	3.3	3.4	3.6
■ Surplus/ Defisit	-0.3	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-1.0	-0.9	-1.0	-0.9	-0.7	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6

■ Pendapatan Negara ■ Belanja Negara ■ Surplus/ Defisit

Sumber: Kemenkeu, 2025



# Anggaran BNPB- APBN



Sumber: Kemenkeu, 2025





# Proses penganggaran

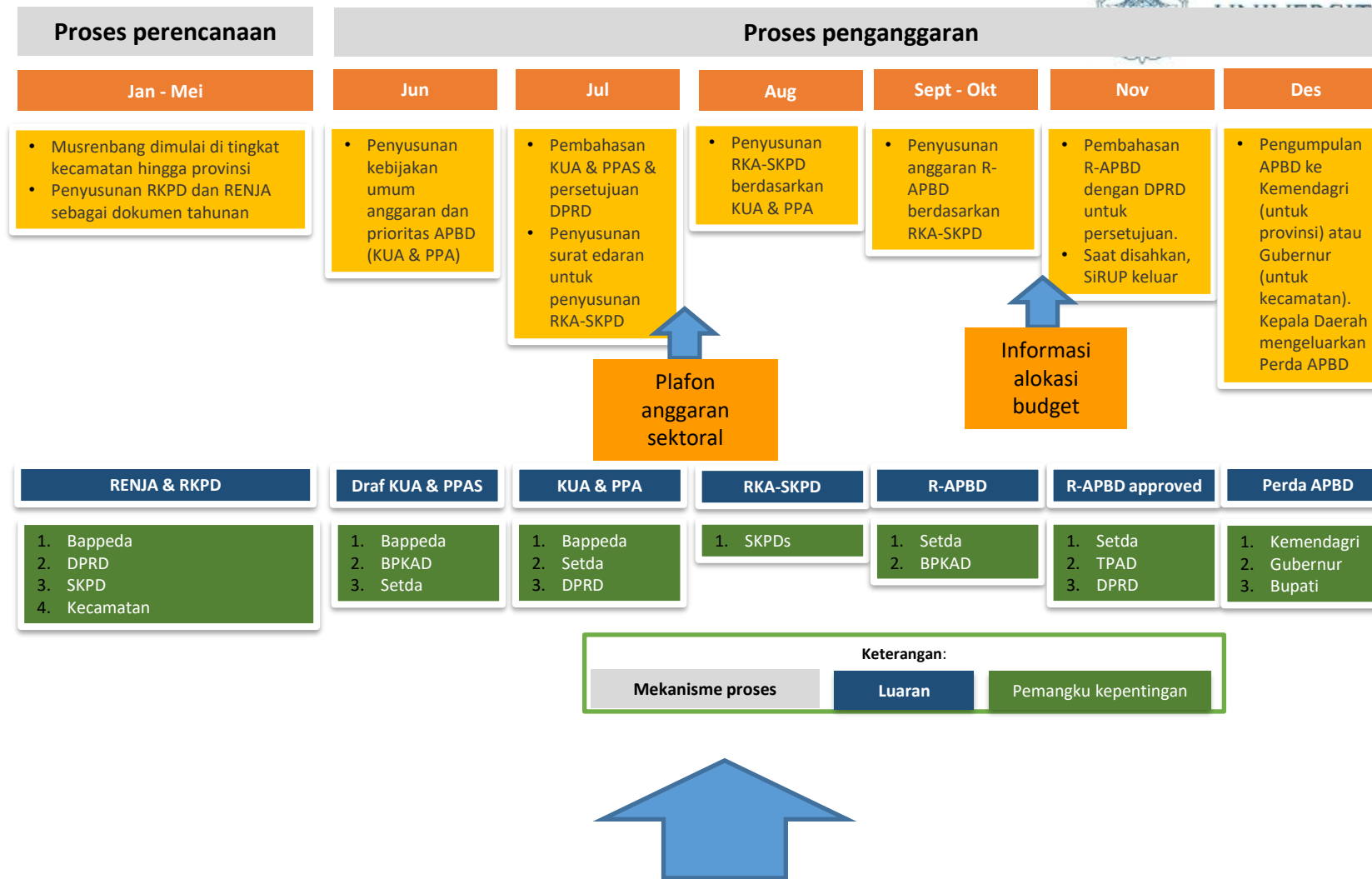


# Proses penganggaran nasional : Tantangan untuk menjamin ketercukupan, ketepatan, keterpaduan dan kesinambungan

Jan-Apr	Mei-Jul	Agust-Okt	Nov-Des
<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan arah kebijakan, asumsi, dan prioritas pembangunan</li><li>• Penyusunan <i>resource &amp; envelope</i> usulan kebijakan APBN</li><li>• Penyusunan SEB Pagu Indikatif</li><li>• Penyusunan Renja K/L</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembicaran pendahuluan APBN dan penyusunan KEM, PPKF, dan RKP</li><li>• Penyusunan SE Pagu Anggaran K/L (Pagu Sementara)</li><li>• Penyusunan RKA K/L</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan dan pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan dan Himpunan RKA KL</li><li>• Penetapan RAPBN</li><li>• Persetujuan RUU APBN</li><li>• Penyusunan SE Alokasi Anggaran K/L (Pagu Definitif)</li><li>• Penyesuaian RKA K/L</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penetapan SP RKA K/L</li><li>• Penyusunan dan penetapan Keppres Rincian ABPP</li><li>• Penyusunan DIPA</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Presiden</li><li>• Bappenas</li><li>• DJA</li><li>• K/L</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DPR</li><li>• DJA</li><li>• K/L</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DPR</li><li>• Presiden</li><li>• DJA</li><li>• K/L</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presiden</li><li>• DJA</li><li>• K/L</li></ul>

## **Sumber :**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



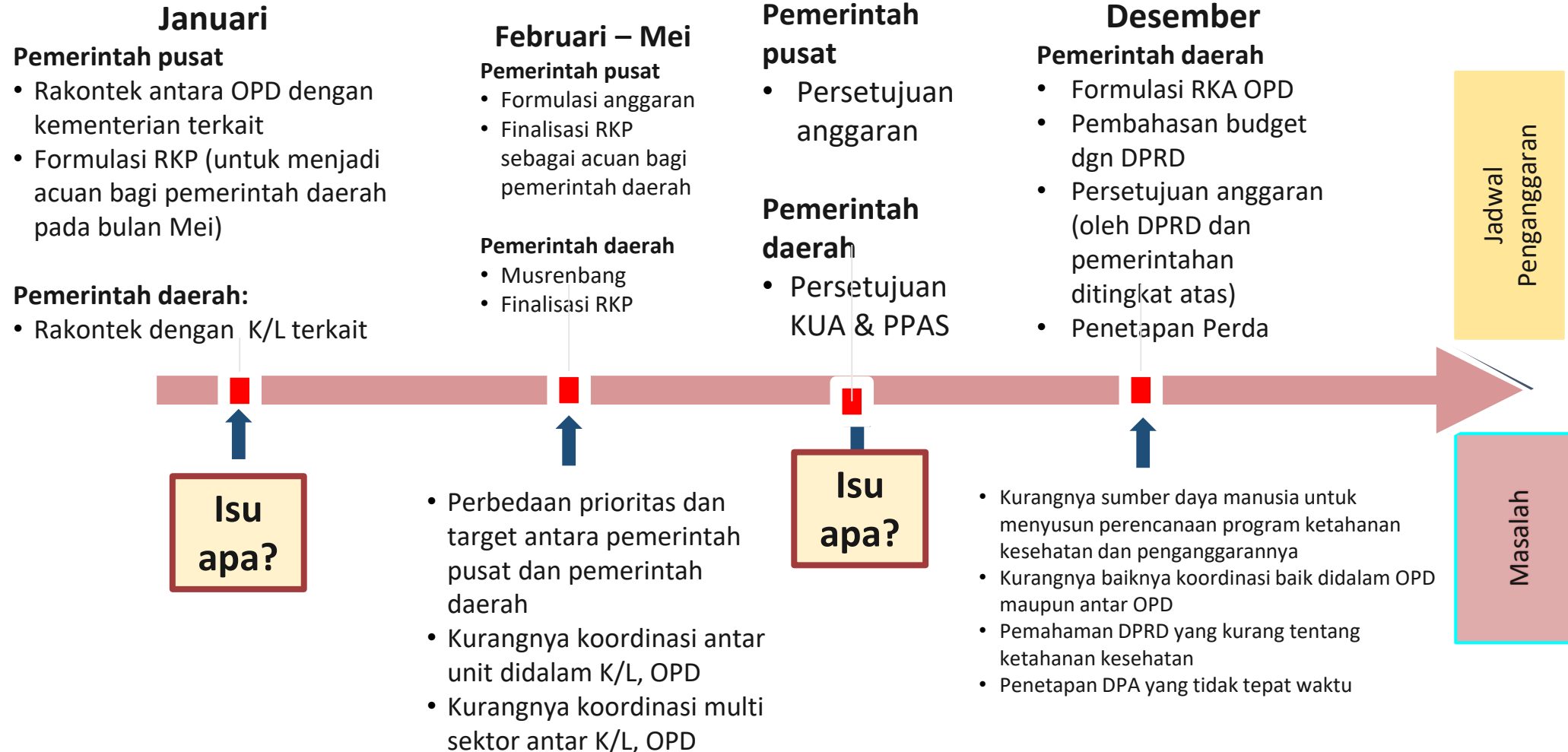
Menjamin ketersediaan sumber daya untuk implementasi perencanaan



# TIMELINE – Tepat Waktu



UNIVERSITAS GADJAH MADA





UNIVERSITAS  
GADJAH MADA



2

**Sumber dana**

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

## Pemetaan Sumber, jenis dan penggunaan dana bencana

- Memastikan besaran dana
- Kawal dana
- Realisasi

Jenis Dana	Lembaga Terkait	Penggunaan
<b>Dana penanggulangan bencana<sup>1,2</sup></b>	a. National : APBN (BNPB, kementerian dan Lembaga terkait) b. Sub-national : APBD (BPBD, Organisasi Perangkat Daerah terkait)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pra-bencana</li> <li>• Tanggap darurat</li> <li>• Pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi)</li> </ul>
<b>Dana kontijensi bencana<sup>1,2</sup></b>	a. National : APBN (BNPB, kementerian dan Lembaga terkait) b. Sub-national : APBD (BPBD, Organisasi Perangkat Daerah terkait)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pra bencana – situasi terdapat potensi bencana – kegiatan kesiapsiagaan</li> </ul>
<b>Dana siap pakai<sup>1,2,3</sup></b>	a. BNPB b. BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggap darurat (pengadaan barang dan jasa)</li> </ul>
<b>Dana bantuan social berpola hibah<sup>1,2,4,</sup></b>	a. BNPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasca bencana</li> </ul>
<b>Dana masyarakat<sup>1,2,5,6</sup></b>	a. BNPB b. BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana</li> </ul>
<b>Dana lembaga international dan lembaga asing non-pemerintah<sup>1,2,7</sup></b>	a. Pra-bencana dan Pasca bencana : BNPB, Kementerian dan Lembaga terkait b. Tanggap darurat : BNPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pra-bencana</li> <li>• Tanggap darurat</li> <li>• Pasca bencana</li> </ul>



# Dana untuk Bencana



UNIVERSITAS GADJAH MADA



Pendanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia :

1. Dana DIPA (APBN/APBD)
2. Dana Kontijensi
3. Dana On-call
4. Dana Bantual Sosial Berpola Hibah
5. Dana yang bersumber dari masyarakat
6. Dana dukungan komunitas internasional
7. Filantropi

# Disaster Pooling Fund atau Pooling Fund Bencana (PFB)



UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Instrumen pendanaan bencana di Indonesia yang mengumpulkan dana dari berbagai sumber (pemerintah pusat, daerah, swasta, dll.) untuk dikelola secara berkelanjutan
- Dana ini **berfungsi** sebagai dana pengumpul, pengembang, dan penyalur untuk pembiayaan kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, termasuk pembayaran premi asuransi aset negara dan daerah untuk memindahkan risiko bencana ke pihak ketiga
- PFB juga memiliki kemampuan untuk **mentransfer** risiko bencana ke pasar keuangan melalui pengasuransian aset negara (BMN) dan aset daerah (BMD).
- PFB dikelola oleh sebuah unit pengelola dana di bawah Kementerian Keuangan, yaitu [BPD LH \(Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup\)](#).
- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana pada 13 Agustus 2021.

Dana PFB dikelola oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Keuangan

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2025**



UNIVERSITAS GADJAH MADA

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA**

**Dana Penanggulangan Bencana** adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, darurat bencana, dan/atau pascabencana.

**Dana Bersama Penanggulangan Bencana** yang selanjutnya disebut Dana Bersama adalah dana yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi Dana Penanggulangan Bencana yang memadai dan berkelanjutan.



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Beberapa Contoh Kegiatan

32

## PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya

01 pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa

02 alat pemadam api ringan di Desa

03 pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana

04 pembangunan jalan evakuasi

05 penyediaan penunjuk jalur evakuasi

06 kegiatan tanggap darurat bencana alam

07 penyediaan tempat pengungsian

08 pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam

09 rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam

10 sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

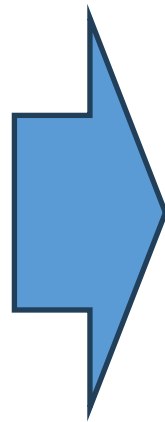
## Dana Desa Untuk Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam





# Dana Filantropi

ide, kegiatan, atau aksi yang dilakukan atas dasar kemanusiaan dan melibatkan pengorbanan-pengorbanan, baik pengorbanan waktu, biaya, pengalaman, keterampilan, jaringan, untuk membuat dunia menjadi lebih baik (LAAF, 2014).



## Potensi Pemanfaatan

- Menaikkan Premi PBPU dan memperbesar
- Menambah Out-of-Pocket, termasuk cost-sharing
- Mekanisme Public-Private-Partnership untuk infrastruktur

## Sumber Dana

Donasi:

- Oleh perorangan
- Oleh Badan Usaha
- Oleh Lembaga
- ...dll
- Masyarakat/Badan Usaha mampu
- Organisasi keagamaan
- Organisasi kemasyarakatan (berbasis keluarga, kedaerahan, dll)
- .....dll



# Permensos No. 8/2021

## Pengumpulan Uang dan Barang

### Pasal 3

1. Penyelenggaraan PUB dilaksanakan masyarakat oleh Ormas yang berbadan hukum.
2. Ormas yang dimaksud: perkumpulan atau yayasan.
3. Penyelenggaraan PUB harus mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangan.



## Pasal 4

Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin:

1. Zakat
2. Pengumpulan dalam tempat peribadatan
3. Keadaan darurat di lingkungan terbatas
4. Gotong-royong di lingkungan terbatas (sekolah, kantor, RW atau tetangga, kelurahan atau desa)
5. Dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan



# Berbagai Bentuk Badan Usaha

- *Vennotschaap* (korporasi, koperasi, CV, firma)
- *Vereniging* (perhimpunan, paguyuban, serikat)
- *Stichting* (yayasan):
  1. Nirlaba
  2. Tidak memiliki anggota
  3. Deviden kembali ke yayasan

Sumber: Visnu, 2023



# Lembaga Filantropi Indonesia



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Beberapa contoh lembaga filantropi di Indonesia, antara lain:

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mengelola zakat, infak, dan shadaqah
- LazisMu (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah)
- Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) yang merupakan lembaga nirlaba dan independen

Selain lembaga filantropi, ada juga beberapa organisasi masyarakat dan sosial yang bergerak di bidang filantropi, seperti:

- Yayasan Tanoto
- Yayasan Tifa
- HarapanMembantu
- Wahana Visi Indonesia
- Yayasan Plan Internasional Indonesia
- Dompet Dhuafa
- Yayasan Pertamina
- Selamatkan Anak-Anak Indonesia



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA



**3**

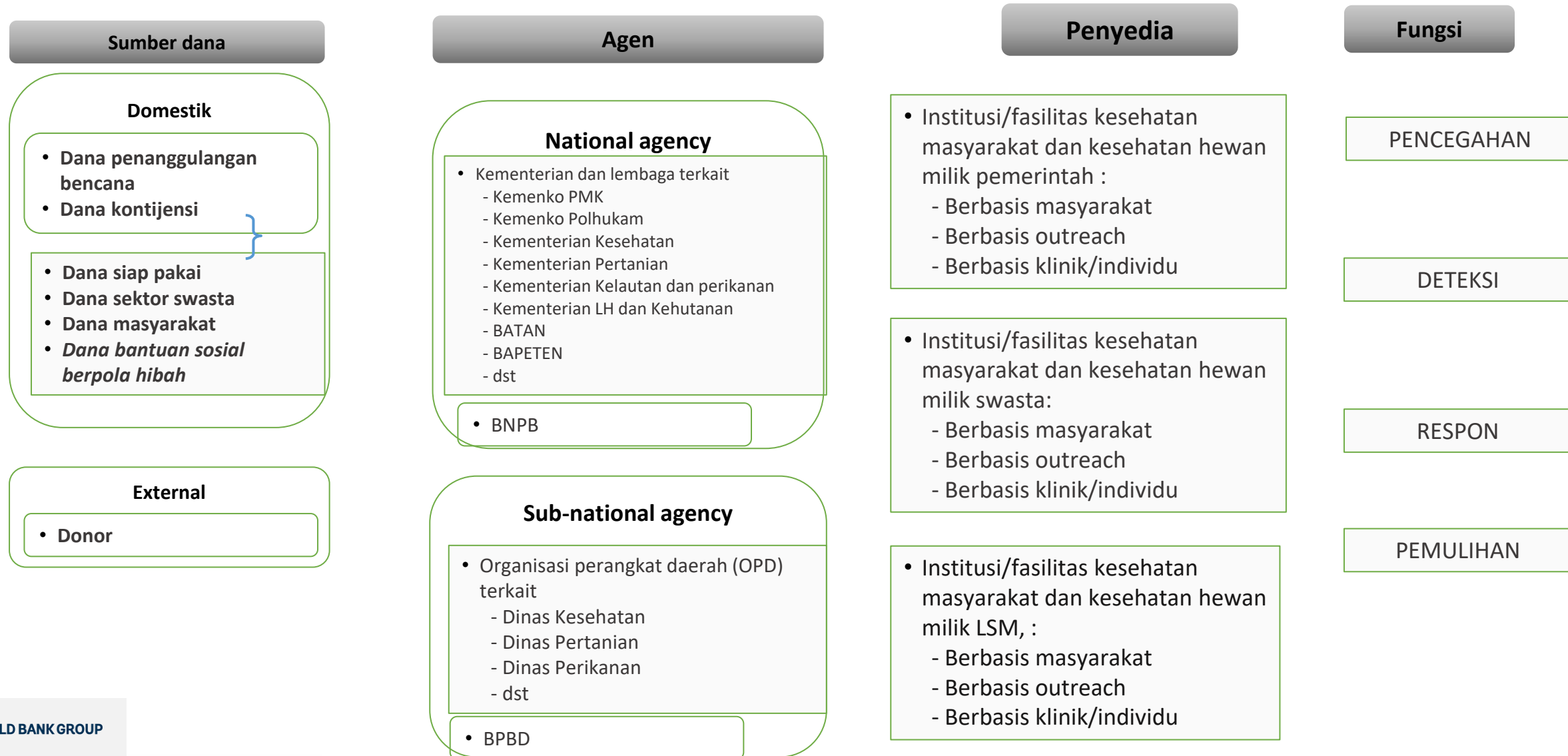
## Mekanisme pembiayaan

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

# Pemetaan Aliran dana



UNIVERSITAS GADJAH MADA





# Proses Aliran Dana Siap Pakai

1. **Pengajuan permintaan Dana Siap Pakai** oleh pemerintah daerah kepada Kepala BNPB.
2. **Penetapan besarnya pemberian Dana Bantuan Siap Pakai** dilakukan oleh Kepala BNPB selaku Pengguna Anggaran. Besarnya bantuan ditetapkan berdasarkan usulan dari daerah/instansi/lembaga terkait, laporan Tim Reaksi Cepat (TRC), hasil rapat koordinasi atau inisiatif dari BNPB.
3. **Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai** dari BNPB diserahkan secara langsung kepada provinsi/kabupaten/kota yang terkena bencana dapat dalam bentuk uang, barang dan jasa.
4. **Penanggung jawab pengelolaan bantuan Dana Siap Pakai adalah** Kepala BPBD tingkat Provinsi dan atau Kepala BPBD tingkat Kabupaten/Kota. Instansi/lembaga pemerintah terkait dalam mengelola bantuan Dana Siap Pakai dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.
5. **Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai** dilakukan dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.  
Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian/ pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.

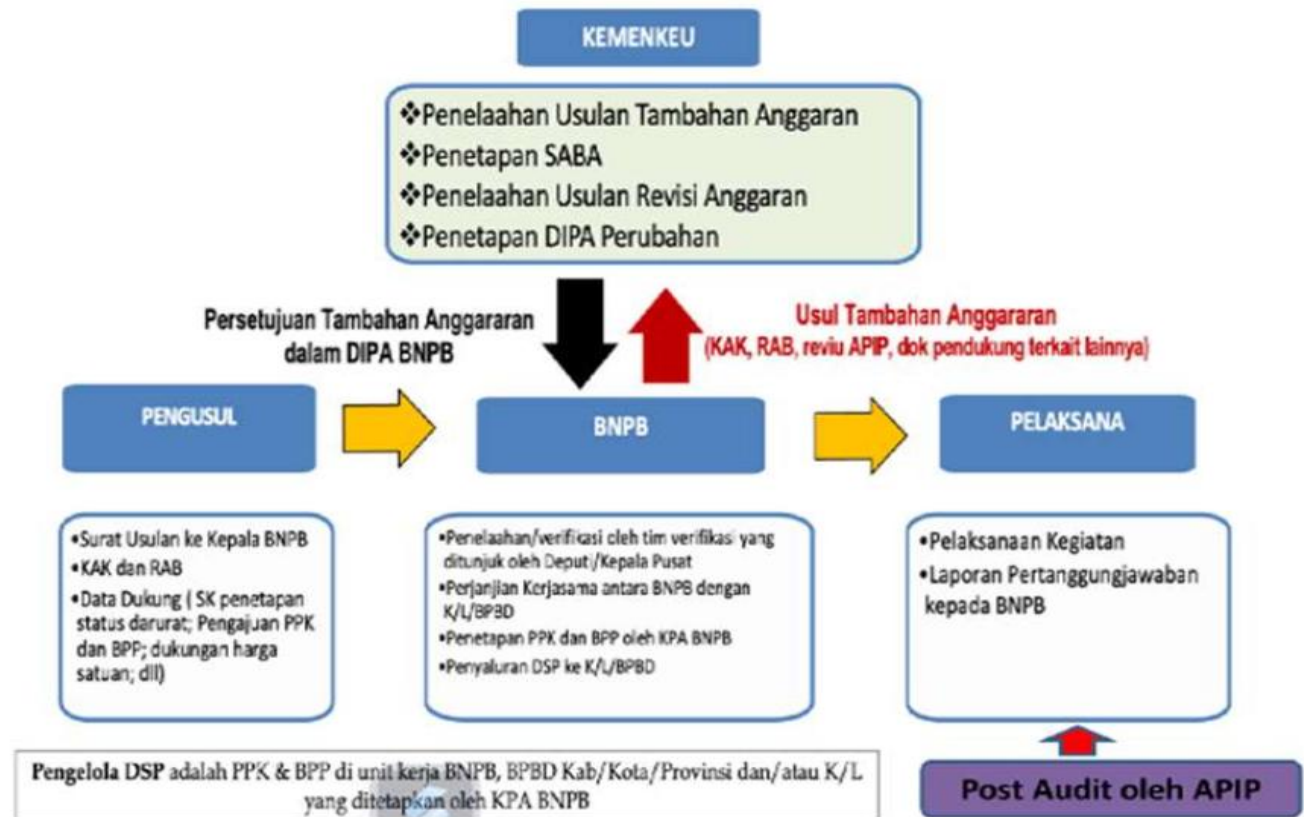
# Dana Siap Pakai - Pusat

## Penggunaan APBN - BNPB

### DANA SIAP PAKAI



dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB

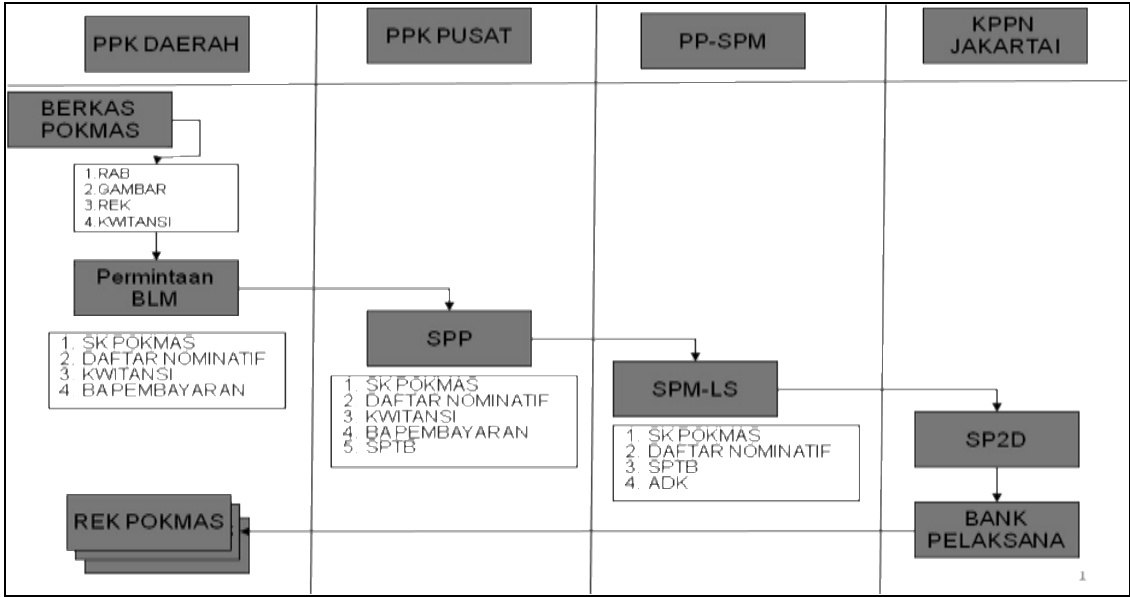




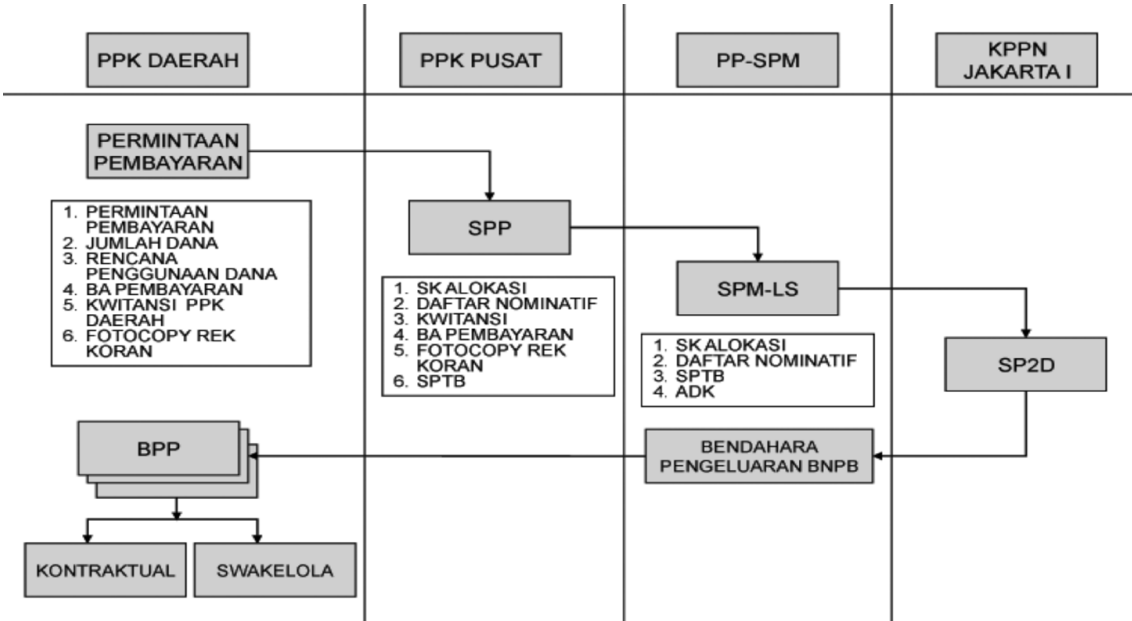
# Aliran Dana Bansos Berpola Hibah



Bagan alur pencairan bantuan langsung masyarakat



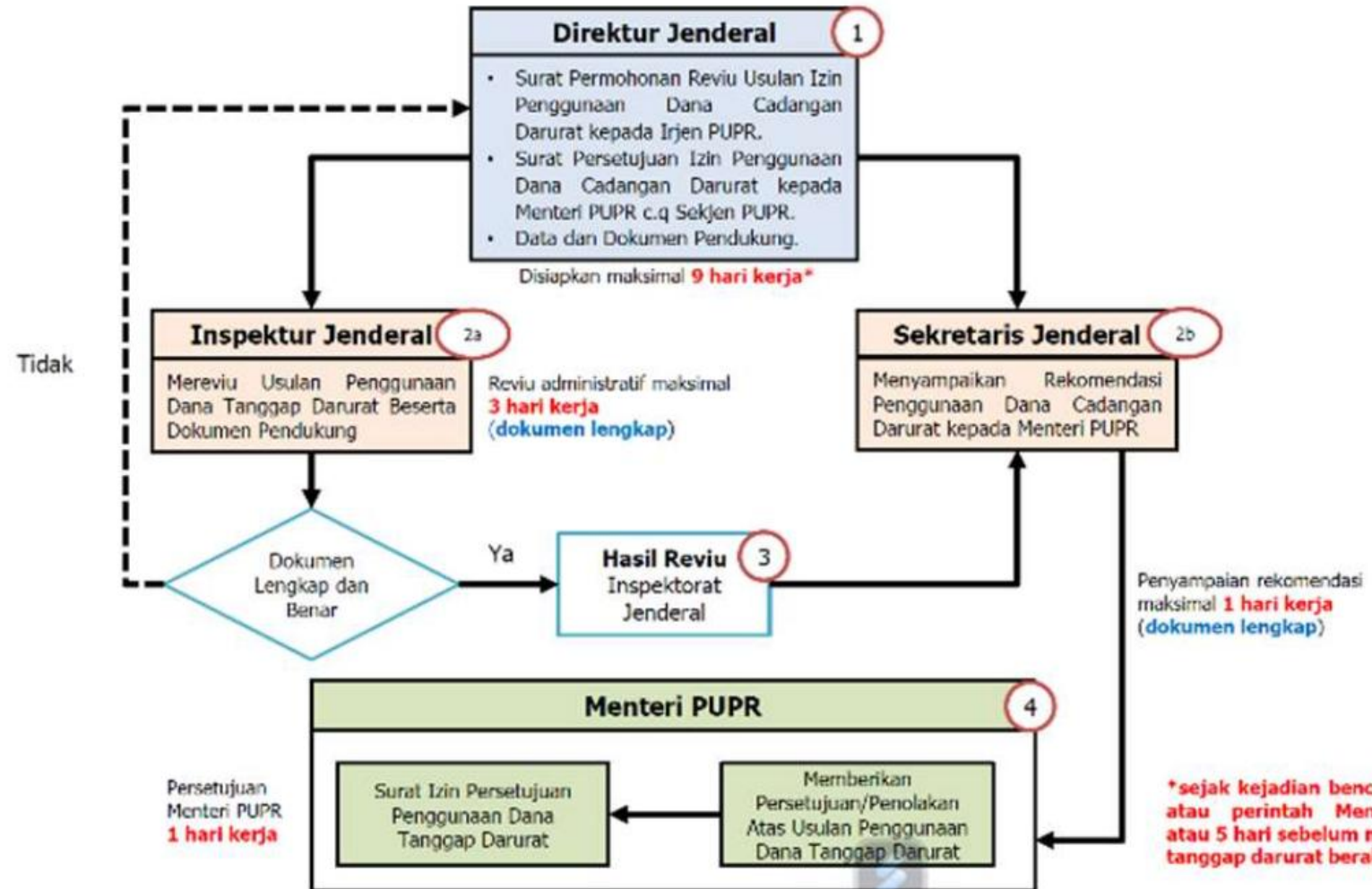
Bagan alur pencairan non-bantuan langsung masyarakat



Tantangan dan peluang untuk meningkatkan koordinasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan agar distribusi bantuan sosial pasca bencana dapat lebih tepat sasaran dan tepat waktu.

# Dana Bencana Kementerian

## ALUR MEKANISME PENGGAJUAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN TANGGAP DARURAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 10 Tahun 2017)



# Skema Pooling Fund Bencana



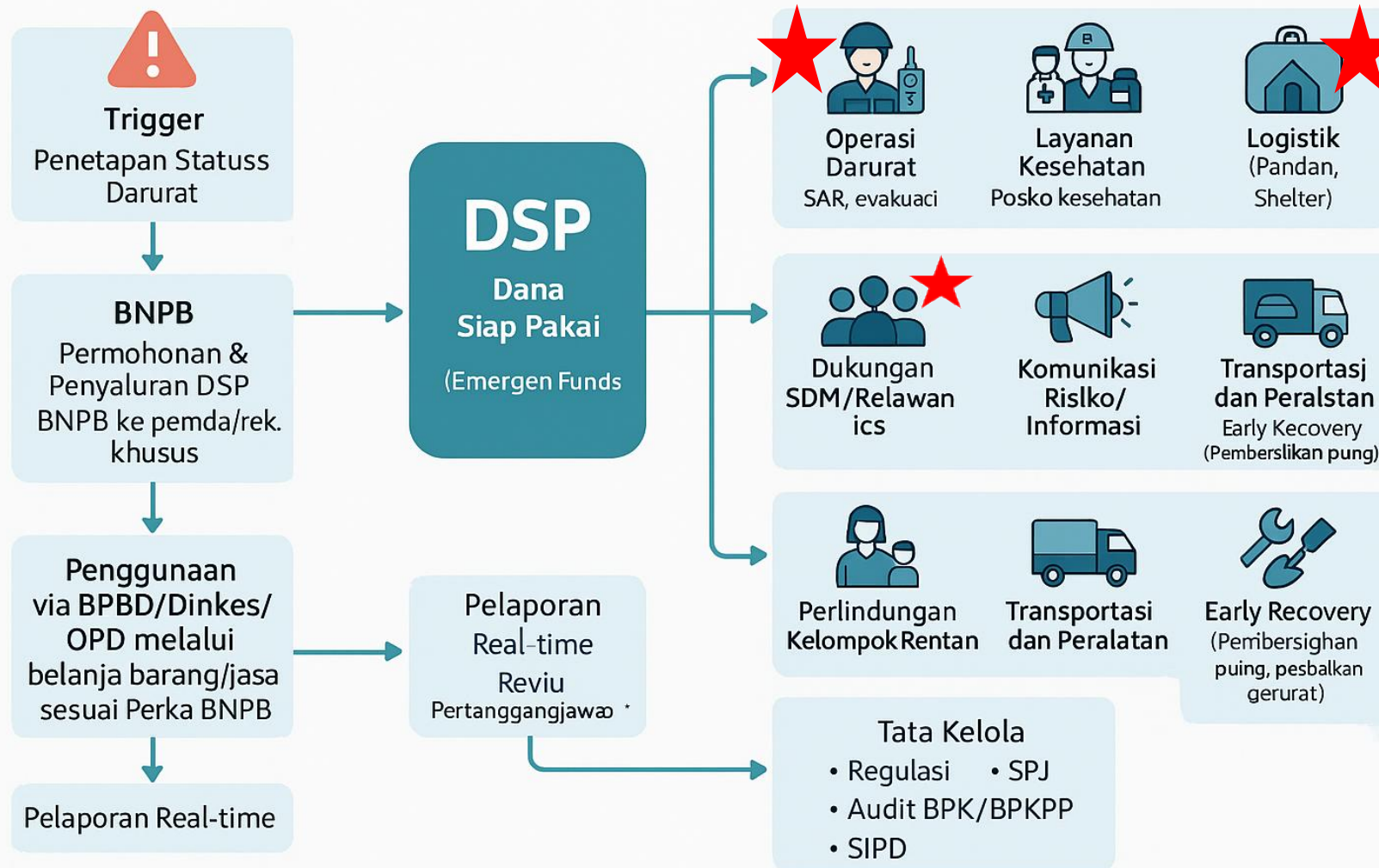
Sumber: Kemenkeu, 2024

# Dana Siap Pakai



UNIVERSITAS GADJAH MADA

## Penggunaan Dana Siap Pakai di Pemerintah Daerah



- **Perlu pengawasan -> siapa yang mengawasi -> cukup dari Pemerintah atau dibutuhkan pengawas lain**
- **Titik rawan korupsi dan penyelewengan\***





## PENGUNAAN DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

PEMERINTAH DAERAH



FASE TANGGAP  
DARURAT SELESAI



PENGUNAAN DANA

- PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ★
- PERBAIKAN RUMAH
- PERBAIKAN FASILITAS UMUM

- Perlu pengawasan pemerintah dan non pemerintah
- Titik rawan korupsi
- Keterlibatan sektor swasta





UNIVERSITAS  
GADJAH MADA



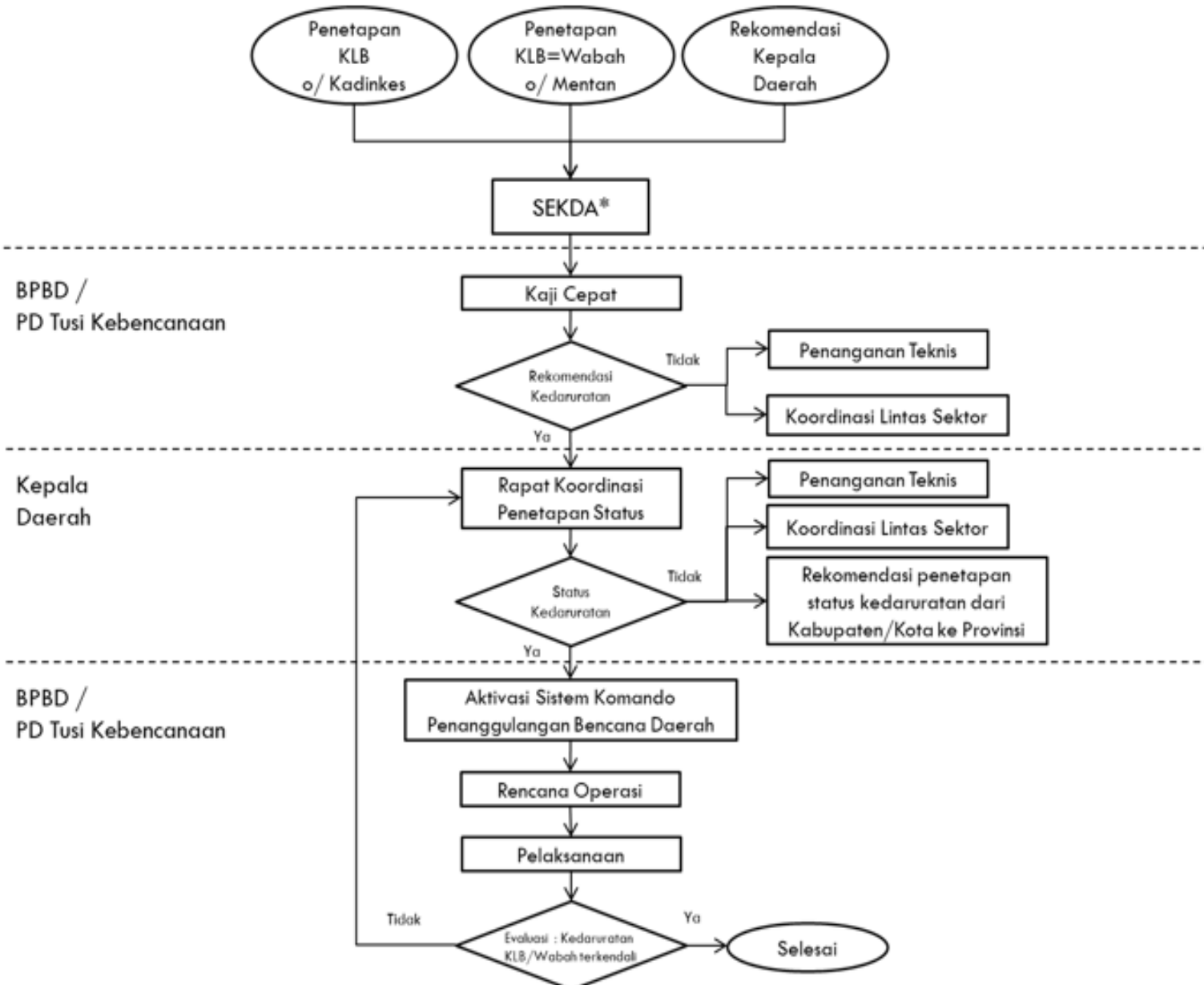
4

**Kasus**

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED



# Ketersediaan anggaran bencana



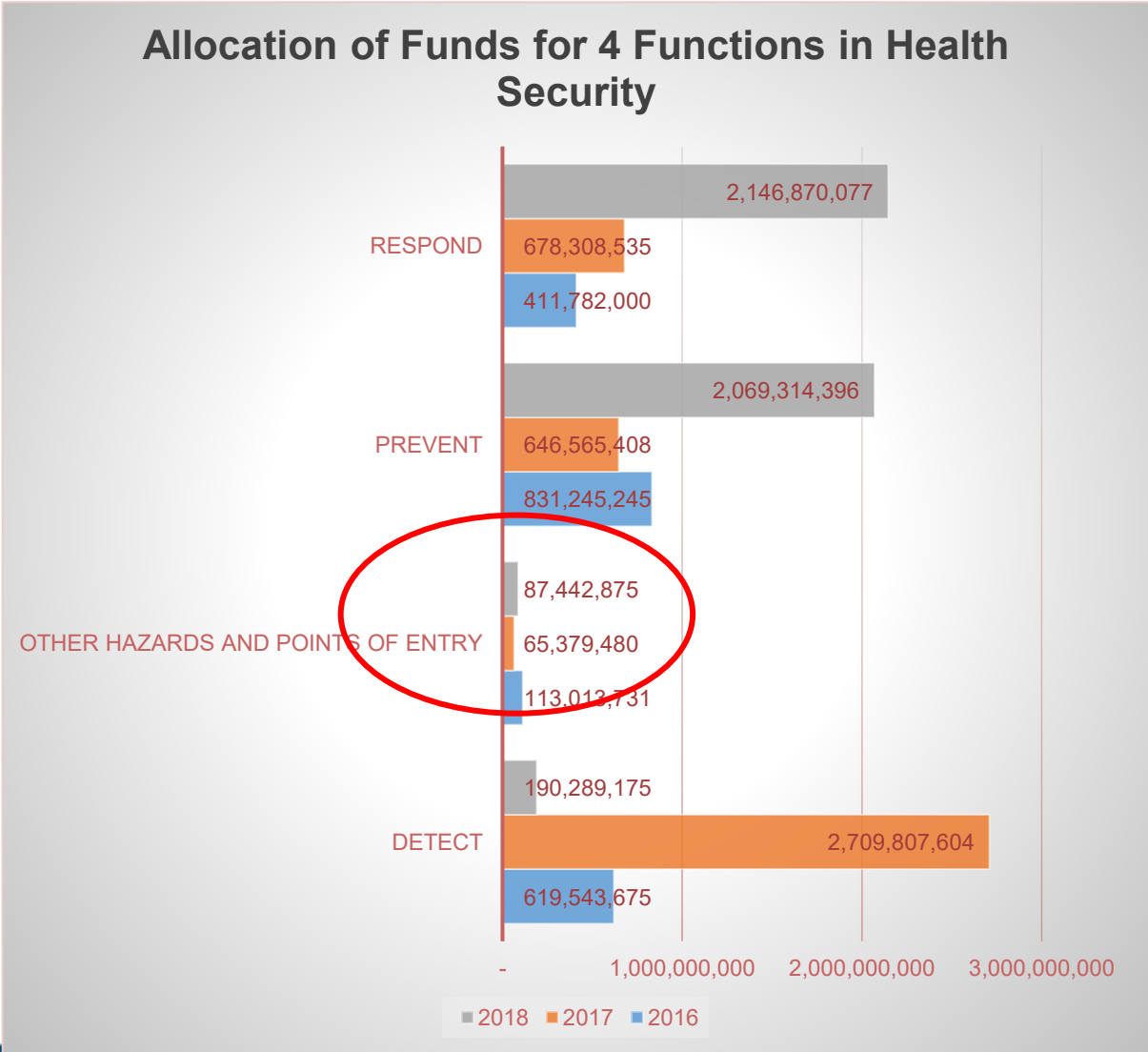
## Alur Koordinasi KLB/Wabah di Tingkat Daerah (Sumber: Kementerian Koordinator PMK, 2018)

# Pembiayaan Ketahanan Kesehatan berdasar 4 Fungsi di tingkat Provinsi

Menunjukkan alokasi dana tersedia di Pencegahan, Deteksi dan Respon

Menunjukkan bahwa Pemda telah berupaya untuk mengalokasikan dana di semua kelompok

Diharapkan Pemda mengalokasi dana untuk **Deteksi, Bahaya lain dan PoE**



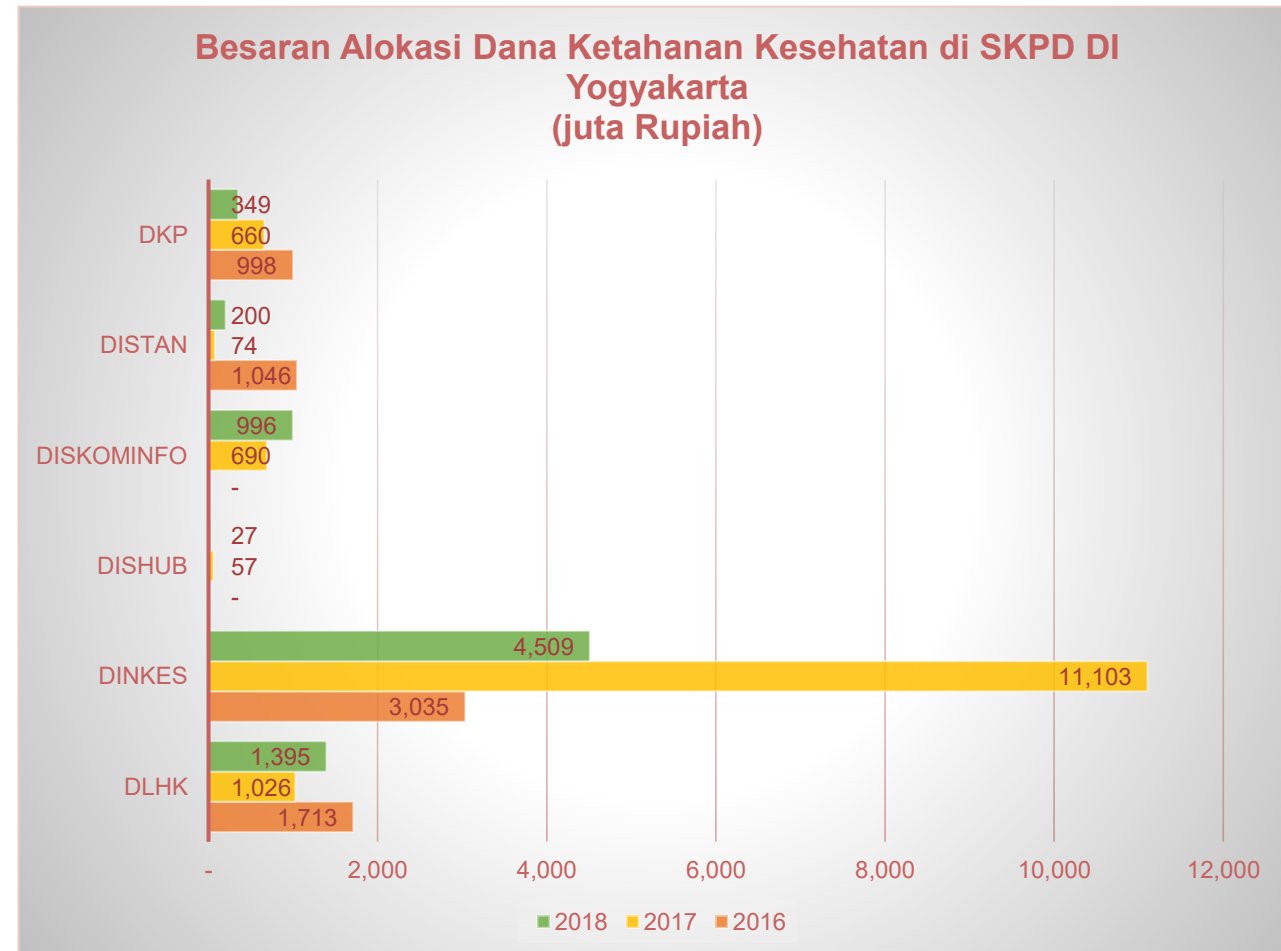
# Alokasi Dana di Setiap SKPD



UNIVERSITAS GADJAH MADA

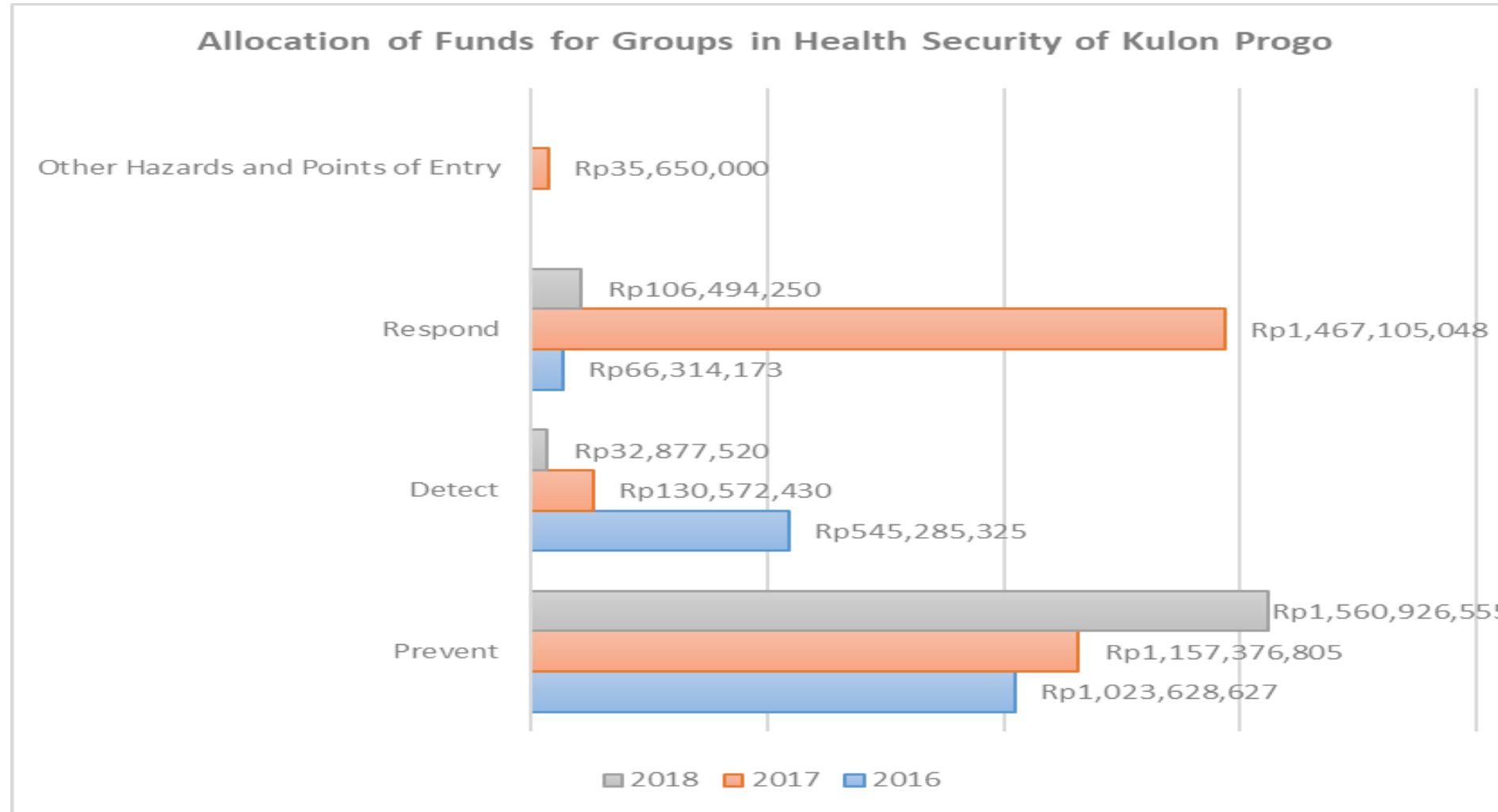
Alokasi dana Ketahanan Kesehatan terbesar ada di Dinas Kesehatan

Pemberian peran dan komitmen SKPD lain dalam upaya ketahanan kesehatan perlu terus dijaga dengan tetap memberikan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi.



Sumber: Dokumen DPA SKPD DIY, 2019

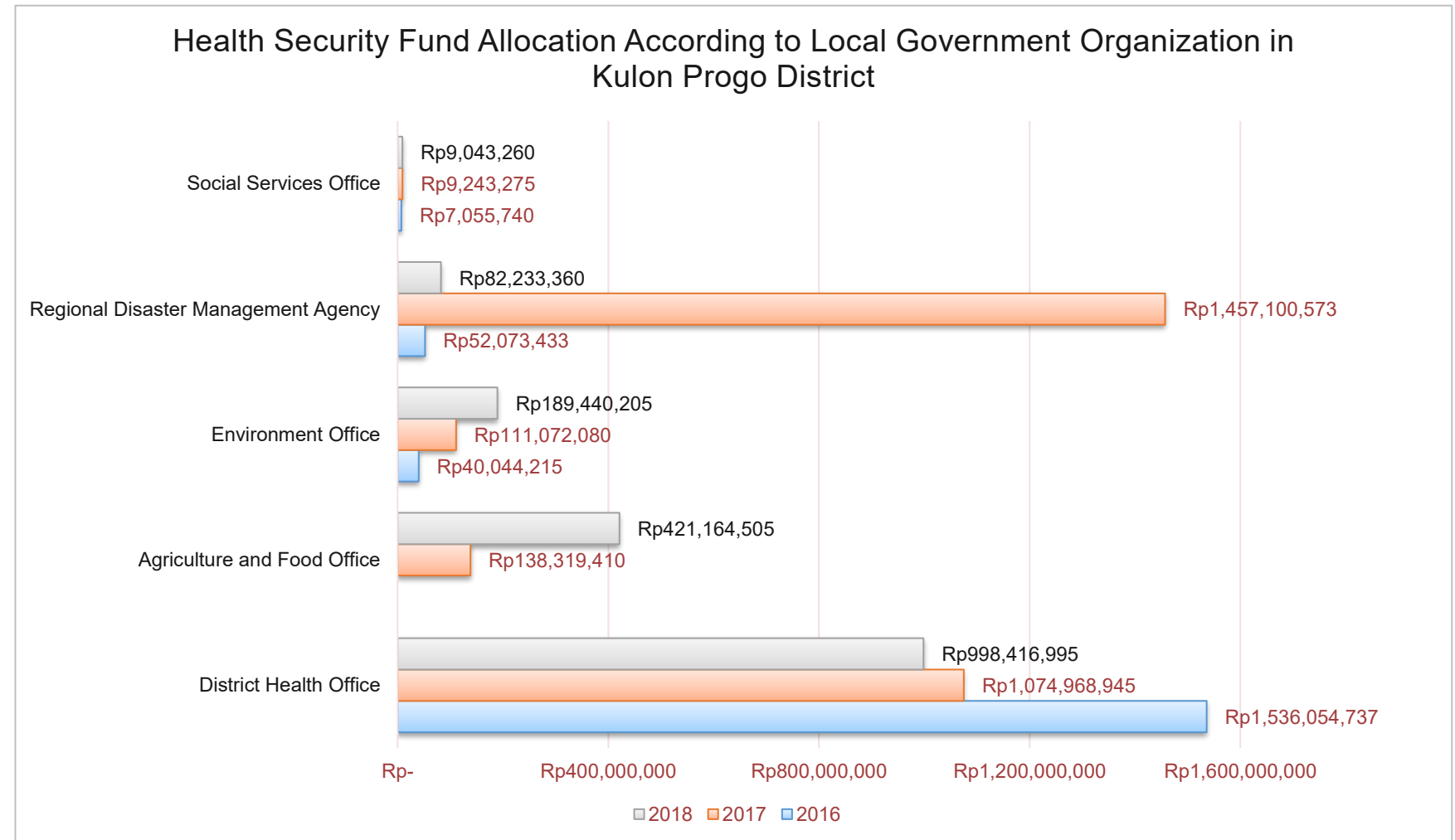




Sumber: Dokumen DPA SKPD Dinas Pemda, 2016-2018; PKMK 2019



# Kondisi Ketersediaan Dana Ketahanan Kesehatan di Kabupaten/ Kota





# DANA SIAP PAKAI / DANA DARURAT

PERATURAN  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEDOMAN  
PENGUNAAN DANA SIAP PAKAI

## Penyaluran Bantuan

1. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dari BNPB dapat diserahkan secara langsung kepada provinsi/kabupaten/kota yang terkena bencana. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi (lampiran 1), dan berita acara penyerahan bantuan uang (lampiran 2).
2. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai kepada instansi/lembaga pemerintah terkait dilengkapi kwitansi, Berita Acara Serah Terima serta Nota Kesepahaman.
3. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi. Setiap penyaluran harus dilakukan pencatatan. Penyerahan bantuan dalam bentuk peralatan dan logistik dibuat berita acara tersendiri (lampiran 3).
4. Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk uang seperti uang lauk pauk (ULP) dan lain-lain dicatat sesuai format penyaluran (lampiran 4).

# Refocusing dan Realokasi APBN



UNIVERSITAS GADJAH MADA

APBN difokuskan untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi



## Pendapatan Negara

Tumbuh  
**-10%**

- **Penerimaan Perpajakan tumbuh -5,4% akibat pelemahan ekonomi dan dukungan insentif perpajakan**
- **Penerimaan PNBPN tumbuh -26,9% akibat jatuhnya harga komoditas dan insentif penurunan harga gas industri**

## Belanja Negara

**255,1 T**  
melalui  
realokasi  
belanja dan  
tambahan  
belanja Covid-  
19

- Penghematan belanja K/L 95,7 T, a.l.:
  - Pemotongan belanja barang 52 T (a.l. Perjadin, paket meeting)
  - Pemotongan belanja modal 42,6 T

<b>DBH turun 27,8 T</b>	<b>Mengikuti penurunan penerimaan negara</b>
DAU turun 42,7 T	Penghematan 10%
DAK Fisik turun 18 T	Pemotongan 25%
DAK NF turun 1,5 T	Penghematan alamiah
Otsus dan DIY turun 1,9 T	Penyesuaian dengan pagu DAU
Dana Desa turun 0,8 T	Penghematan alamiah

- Penguatan belanja penanganan Covid-19 (kesehatan, bansos)

## Defisit

**5,07%**

Pembiayaan anggaran untuk pemulihan ekonomi

Sumber : Kemenkeu, 2020

PKMK, 2020



# Penyesuaian APBD



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Kemenkeu bersama Kemendagri mengeluarkan SKB untuk mewajibkan seluruh Pemda melakukan penghematan belanja barang/jasa, belanja modal, serta normalisasi belanja pegawai dan merealokasi hasilnya untuk penanganan dampak COVID-19

Deskripsi	Sebelum	Sesudah	% Penyesuaian
Pendapatan	1,250.29	1,051.15	-15.93%
- PAD	331.39	235.71	-28.87%
- TKDD	782.40	695.84	-11.06%
- Lainnya	136.50	119.60	-12.38%
Belanja	1,298.26	1,070.27	-17.56%
- Belanja Pegawai	426.77	403.56	-5.44%
- Belanja Barang/Jasa	318.41	207.54	-34.82%
- Belanja Modal	235.66	124.18	-47.31%
- Belanja Lainnya	317.42	335.00	5.54%

(Rp Miliar)

Total belanja APBD di 477 daerah yang direalokasi dan *refocusing* sebesar **Rp71,72 T** dan digunakan untuk:

Rp30,62 T	Rp22,56 T	Rp18,54 T
Kesehatan (COVID-19)	Jaring Pengaman Sosial	Penanganan Dampak Ekonomi

- Secara nasional, pendapatan daerah turun 15,94%, termasuk penurunan PAD yg cukup dalam 28,87%, khususnya di Jawa-Bali dengan tingkat pandemi tinggi.
- Pada sisi belanja, terdapat penurunan 17,56%. Penurunan tertinggi pada belanja barang/jasa dan modal, mencapai 34,82% dan 47,31% untuk direalokasi bagi penanganan COVID-19

Sumber : Kemenkeu, 2020

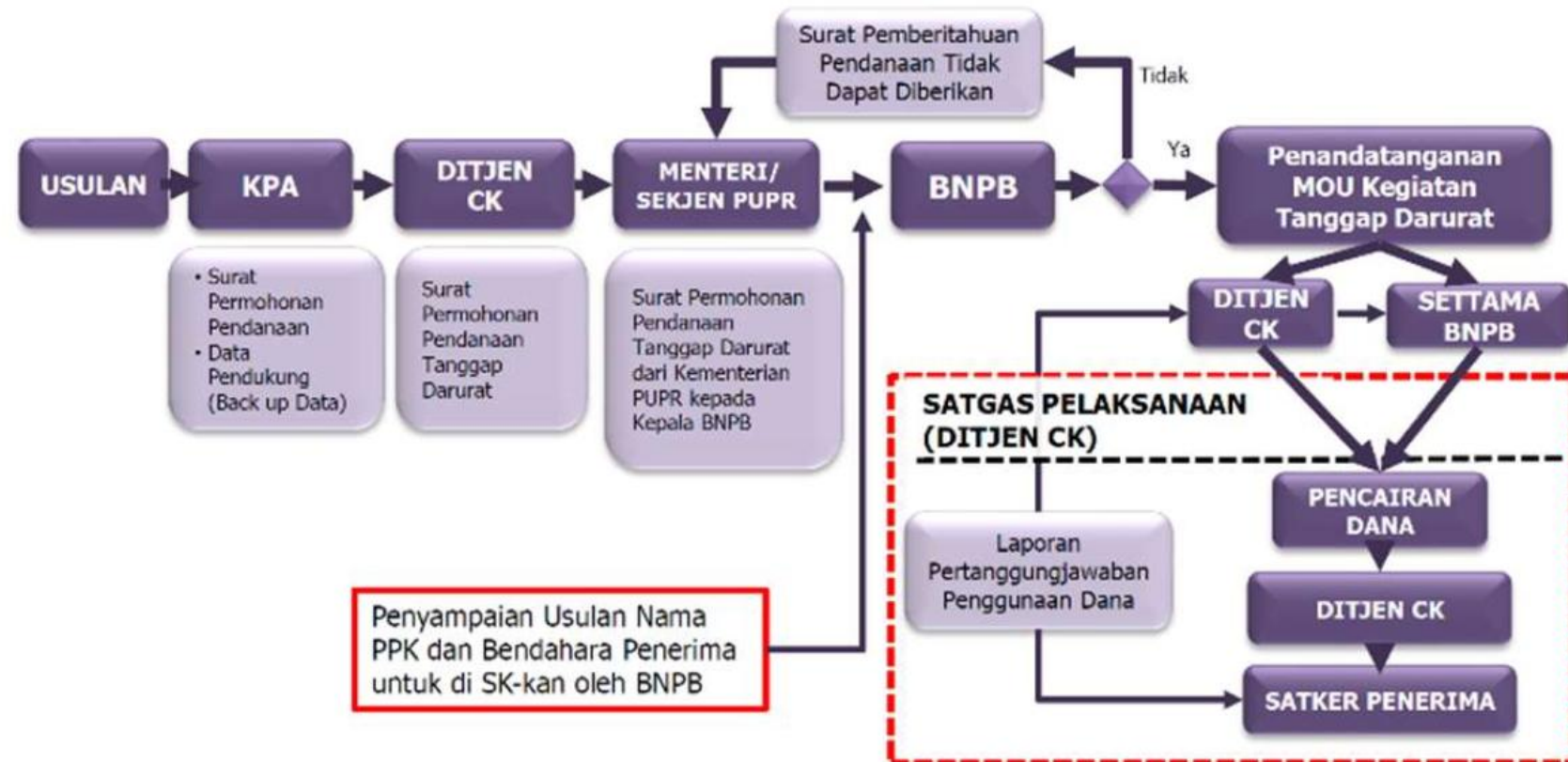
PKMK, 2020



# pendanaan bencana di daerah



# MEKANISME USULAN PENANGANAN BENCANA MELALUI DANA SIAP PAKAI (DSP) BNPB di daerah

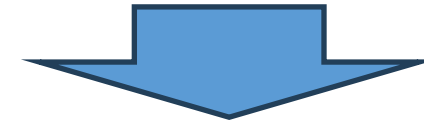




- data BPS tahun 2021, dari 75.584 desa di Indonesia, tercatat sebanyak 13.261 (17,54%) desa terdampak banjir, 7.827 (10,35%) terdampak gempa bumi, dan 5.865 (7,76%) desa terdampak tanah longsor



**Permendagri Nomor 20 Tahun 2018** tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang memberi ruang pada penggunaan **dana desa untuk penanggulangan bencana**



Provinsi NTB sudah mengeluarkan Pergub Nomor 83 Tahun 2023 tentang **Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Peningkatan Risiko Bencana (PRB)**



Payakumbuh, 23 September 2022

Nomor : 360/2751/BPBD-LK/IX-2022  
Lamp : -  
Perihal : **Mekanisme Pelaporan  
dan Pengajuan Bantuan  
Keuangan Pasca Bencana**

Kepada Yth :  
Sdr. Wali Nagari  
Se-Kab.Lima Puluh Kota  
di  
- Tempat

Dengan Hormat,

Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Indeks Resiko Bencana yang cukup tinggi di Sumatera Barat yang mengakibatkan kerentanan akibat bencana juga tinggi. Oleh karena itu perlu diinformasikan kepada masyarakat tentang mekanisme pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Pasca Bencana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Pasca Bencana.

Berdasarkan hal diatas diminta perhatian dan kerjasama saudara terhadap hal-hal berikut :

1. Jika yang terdampak bencana adalah rumah masyarakat/pribadi maka pelaporan dan pengajuan permohonan bantuan dialamatkan ke BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota, kecuali untuk yang terdampak kebakaran dialamatkan ke Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan administrasi sebagai berikut :
  - a) Laporan kejadian dari Wali Nagari ( yang juga memuat perkiraan kerugian ) yang diketahui oleh Camat.
  - b) SK Wali Nagari tentang penetapan kejadian bencana.
  - c) Permohonan bantuan dari masyarakat terdampak yang diketahui Wali Nagari.
  - d) Foto copy KTP/KK
  - e) Foto copy Rekening Aktif
  - f) Foto dokumentasi
  - g) Seluruh dokumen dibuat dalam rangkap 2 (dua)
2. Jika yang terdampak bencana adalah fasilitas umum, maka mekanisme pelaporan dialamatkan kepada dinas teknis yang membidangi fasilitas umum tersebut.

Demikian kami Sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

  
RAHMADINOL, S. Pd  
Nip. 19740414 199603 1 001

# Mekanisme Pelaporan dan Pengajuan Bantuan Keuangan Pasca Bencana



# Prosedur Pengajuan Dana Stimulan Rumah Korban Bencana

12 Jan 2020 12:13 WIB

© Dilihat 9194 kali



UNIVERSITAS GADJAH MADA

## Dana stimulant untuk bencana

REKAPITULASI DATA DAMPAK BANJIR DAN LONGSOR JABODETABEK & LEBAK													
Minggu, 12 Januari 2020 Pkl. 06.00 WIB													
NO	Wilayah Terdampak	Jumlah Terdampak		Ketinggian Air Maksimal (m)	Ketinggian Air Saat ini (m)	Jumlah Pengungsi		Meninggal	Hilang	Jumlah Titik Pengungsi	Terdampak		Keterangan
		Kecamatan	Kelurahan / Desa			KK	Jiwa				KK	Jiwa	
1	Kab Bekasi	0	0	3	0	0	0	1		0	1.355	3.123	Diperbarui
2	Kota Bekasi	0	0	6	0	17	63	9		1	104.114	366.274	Diperbarui
3	Kab Bogor	24	47	2	0	-	21.742	11		33	1.123	3.384	Diperbarui
4	Kota Tangerang	0	0	3	0	0	0	6		0	24.745	53.931	Diperbarui
5	Kota Tangerang Selatan	0	0	2	0	0	0	4		0	18.045	65.001	Diperbarui
6	Jakarta Timur	0	0	2	0	0	0	8		0	1.588	5.126	Diperbarui
7	Jakarta Barat	1	1	1	0	0	0	4		0	-	-	Diperbarui
8	Jakarta Selatan	0	0	2	0	217	814	1		5	-	-	Diperbarui
9	Jakarta Utara	0	0	0,7	0	0	0	1		0	-	-	Diperbarui
10	Jakarta Pusat	0	0	0	0	0	0	2		0	-	-	Diperbarui
11	Kab. Lebak	5	8	1	0	1.392	5.106	10	1	11	2.914	11.656	Diperbarui
12	Kota Bogor	0	0	0,8	0	0	0	1		0	0	0	Selesai
13	Kota Depok	0	0	2	0	12	48	3		7	1.306	2.976	Diperbarui
Total		30	56			1.638	27.773	61	1	57	155.190	511.471	

Ket : Lokasi pengungsi di kota Jakarta Selatan berada di Gor Kec Pancoran, Rusun Pengadegan, Madrasah Annasyatul Ilimiyah, SDN03 Pengadegan dan Yayasan Lia

Foto : Prosedur Pengajuan Dana Stimulan Rumah Korban Bencana ( )

JAKARTA - Memasuki hari ke 12 penanganan bencana banjir dan longsor di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten mengalami kemajuan yang baik. Genangan banjir sudah surut di semua lokasi serta jumlah pengungsi juga jauh berkurang.

## Hasil Refocusing dalam rangka Penanggulangan Covid – 19 di RS



UNIVERSITAS GADJAH MADA

**Hasil pengalihan anggaran  
belanja barang di RS TA  
2020**



**Hasil Refocusing dalam  
rangka Penanggulangan  
Covid – 19 di RS total 7  
milyar**



- Belanja barang untuk penanganan Covid-19 Rp. 990 juta
- Belanja obat dan APD Rp. 3,7 milyar
- Belanja alat kesehatan Rp. 2 milyar
- Belanja pembangunan sarana dan fasilitas Kesehatan Rp. 500 juta

# Bantuan Donasi Kemanusiaan/ Charity

(Berdasarkan Institusi)



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Jenis Donasi	Jumlah
Dana	Rp 314.428.246.865,00
Masker	8.262.800 unit
Hand Schoen	1.060.300 kotak
Hazmat Suit	108.780 unit
Pelindung Mata	4.480 unit
Test Kit	30.000 kotak



# Bantuan Donasi Kemanusiaan/ Charity (Berdasarkan Institusi)



UNIVERSITAS GADJAH MADA



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

## DONASI PENGALANGAN DANA BANJIR KALIMANTAN SELATAN & GEMPA BUMI SULAWESI BARAT



Kalimantan Selatan



Sulawesi Barat

### DONASIKAN BANTUAN ANDA SEKARANG

No. Rekening BNI  
0381949634 (a.n Tatik Aniah)\*

\*) INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI 0852 4994 9652 (TATIK); 0813 4913 4333 (WD2)  
BUKTI TRANSFER DAPAT DIKIRIM KE NO WA TERSEBUT UNTUK DIKONFIRMASI.

AYO BANTU RINGKANKAN BEBAN  
SAUDARA-SAUDARA KITA.



[www.faperta.unmul.ac.id](http://www.faperta.unmul.ac.id)



[faperta@unmul.ac.id](mailto:faperta@unmul.ac.id)



FAPERTA UNMUL TV



[faperta.unmul](https://www.instagram.com/faperta.unmul)



Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman



# Pembelajaran dari Bencana





- Pemahaman Bencana Alam dan Bencana Non Alam terbatas – **BNPB-BPBD** –leader pada saat bencana -> Kemenkeu, PUPR, Kemenkes, Kemensos dll
- **Dana siap pakai—dana darurat—dana tidak terduga** – tidak cukup tersedia dan siap digunakan meskipun sudah dianggarkan
- Alokasi dana untuk bencana dan krisis kesehatan masih tergantung keinginan daerah, belum disesuaikan dengan **analisis risiko bencana** dan krisis kesehatan daerah setempat.
- Pengalaman kejadian bencana dan krisis kesehatan belum menjadi dasar pengadaan dan penentuan **alokasi dana untuk bencana dan krisis kesehatan** di daerah.



**Terimakasih**

[www.manajemen-pembiayaankesehatan.net](http://www.manajemen-pembiayaankesehatan.net)